-Revisi-

RENCANA STRATEGIS

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Tahun 2021 -2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, team penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk Dokumen, yang berjudul "Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026".

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari Perubahan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun masyarakat, serta DPRD yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Benteng,1 Agustus 2023

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs.MESDIYONO, M.EC.DEV
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I 3
PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 11
BAB II 13
GAMBARAN PELAYANAN **13**
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA **13**
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **13**
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Kepulauan Selayar 13
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar 61
BAB III 66
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS **66**
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA **66**
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **66**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 66
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 68
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 72
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 86
BAB IV 88
TUJUAN DAN SASARAN **88**
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 88
BAB V 97
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **97**
Tabel 6.1 ..... **103**
Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan **103**
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga **103**
Analisa SWOT Pengembangan Sektor Pendidikan **103**
di Kabupaten Kepulauan Selayar **103**
BAB VI 107
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **107**
BAB VII 225
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **225**
P E N U T U P **231**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Seiring dengan ditetapkannya kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional (UU Pasal1 Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stake holders*.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memiliki daya saing khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari terlaksananya pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata. Oleh karena itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif.

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government*). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomot 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan PerencanaanPembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103;
41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 672).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar; Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Kementrian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan terhadapRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, serta penentuan Isu-isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat uraian terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersama Kepala Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Kepulauan Selayar

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
   a. Subbagian Program
   b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
   c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
   a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
   b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,terdiri atas:
   a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
   b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, terdiriatas:
   a. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
   b. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
   a. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Funfsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, kepala dinasmenyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
h. menyelenggarakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
i. menyelenggarakan pembinaan pendidikan dasar;
j. menyelenggarakan pembinaan kurikulum;
k. menyelenggarakan pembinaan pemuda dan olahraga;
l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas pokok sekretaris, yaitu :

a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian program meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
i. menyusun dokumen evaluasi dinas;
j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
l. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
i. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
l. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pengelolaan Pendidikan

Bidang Pengelolaan Pendidikan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan teknisbidang pengelolaan pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dibidang pengelolaan pendidikan; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Pendidikan membawahi dua seksi yaitu Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
g. menyusun bahan kebijakan pendidikan sekolah dasar;
h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan sekolah dasar;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan sekolah dasar;
j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama. Uraian tugas Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakanpendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. menyusun bahan kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
d. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi dua seksi yaitu :

1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. Uraian tugas Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
g. menyusun bahan rencana kebutuhan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
h. menyusun bahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan guru dan tenaga pendidikan SMP;
g. menyusun bahan rencana Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. menyusun bahan pembinaan Seksi Guru Dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Guru Dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertamadan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra membawahi tiga seksi yaitu:

1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum pendidikan dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
h. menyusun bahan pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpengembangan kurikulum pendidikan dasar;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal

Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PengembanganKurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.Uraian tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
g. menyusun bahan penetapan pengembangan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian nonformal;
h. menyusun bahan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formalserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
d. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga; dan
e. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

(Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 121 Tahun 2021)

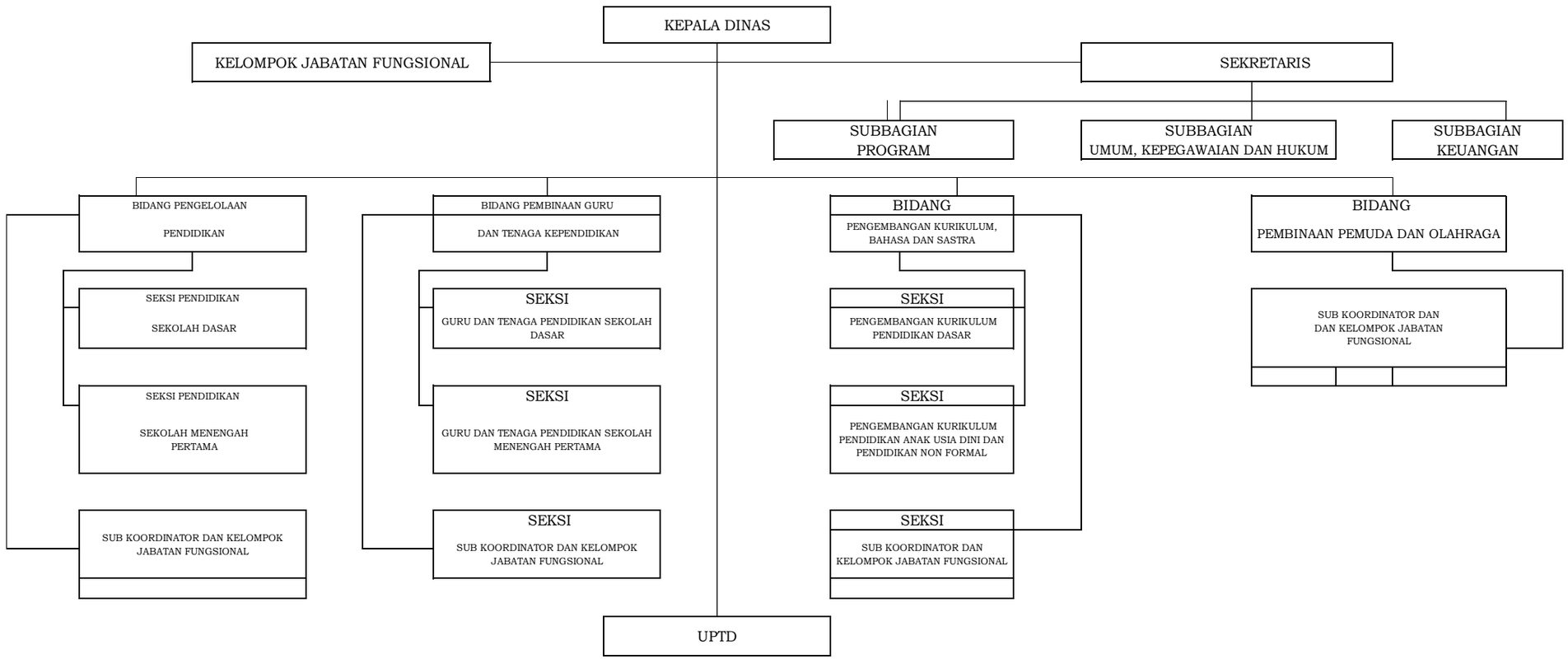

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

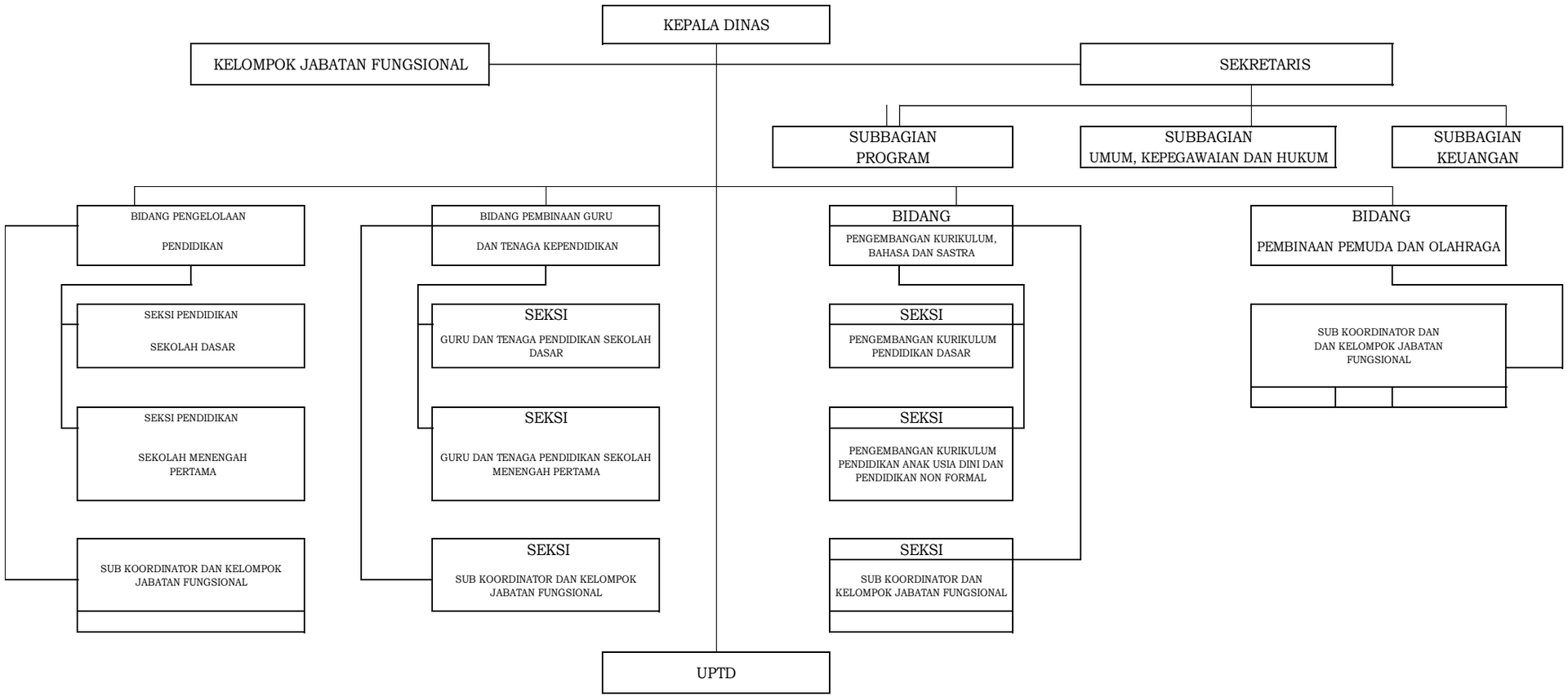

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perlengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaandalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya – sumber daya lainnya. Sumber Daya Manusia terdiri dari atas dua yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut jabatan.

   Pada Tahun 2021 tercatat jumlah pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 126 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS, PTT dan Tenaga Sukarela seperti terlihat pada tabel 2.2.1.1 berikut :

Tabel 2.2.1.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	IV	1	1	1	
2.	III	14	14	28	
3.	II	3	4	7	
4.	I	1	0	1	
5.	PTT	34	49	83	
6.	Sukarela	2	2	4	
Total		**56**	**70**	**125**	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Kepangkatan.

   Pada Tahun 2023 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Kepangkatan didominasi oleh pangkat Penata Tk.I. Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.1.2.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk.I	-	-	-	
3.	Pembina	-	1	1	
4.	Penata Tk. I	11	6	17	
5.	Penata	1	4	5	
6.	Penata Muda Tk. I	-	3	3	
7.	Penata Muda	2	1	3	
8.	Pengatur Tk. I	1	2	3	
9.	Pengatur	1	2	3	
10.	Pengatur Muda Tk. I	1	-	1	
11.	Pengatur Muda	1	-	1	
Total		**21**	**19**	**38**	

3. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut tingkat Pendidikan.

Pada Tahun 2023 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S1/Sarjana. Adapun jumlah dan komposisi menurut Pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2.1.3.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai								Ket
		PNS		PTT		Sukarela		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	S2	5	2	2	2	-	-	7	6	
2.	S1	13	9	13	23	1	-	27	33	
3.	D3	3	1	-	2	-	-	3	3	
4.	SLTA	2	7	20	24	2	-	24	33	
5.	SLTP	2	-	-	-	-	-	2	-	
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		**25**	**19**	**35**	**51**	**3**	**-**	**63**	**75**	

4. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menduduki jabatan Eselon.

Pada Tahun 2023 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag). Adapun jumlah dan komposisi menurut Eselon seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.2.1.4.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas)	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	1	-	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	3	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	4	5	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	-	-	
Total		**9**	**6**	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1
Data Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023

No.	Jenis Aset	Volume		Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		m^2	Jl. Fatmawati No.9 Benteng
2	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
3	Gedung Kantor UPT TK/SD	8	Unit	Baik
4	Gedung Kantor UPT SKB	2	Unit	Baik
5	Gedung Sekolah SD	140	Unit	Baik
6	Gedung Sekolah SMP	52	Unit	Baik
7	Sepeda Motor	70	Unit	Baik
8	Mobil	2	Unit	Baik
9	Meja ½ Biro	63	Buah	Baik
10	Meja Tamu	1	Buah	Baik
11	Meja Rapat	2	Buah	Baik
12	Meja Kerja Pejabat	8	Buah	Baik
13	Meja Kerja Kayu	11	Buah	Baik
14	Meja Komputer	2	Buah	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat	16	Buah	Baik
16	Kursi Tamu	1	Set	Baik
17	Kursi Lipat	18	Buah	Baik
18	Kursi Plastik	32	Buah	Baik
19	Kursi Besi / Metal	270	Buah	Baik
20	Sofa	2	Set	Baik
21	Lemari Kayu	22	Buah	Baik
22	Lemari Besi / Metal	18	Buah	Baik
23	Rak Besi	3	Buah	Baik
24	Filling Cabinet Besi	17	Buah	Baik
25	Brandkas	1	Buah	Baik
26	AC	21	Unit	Baik
27	Sound System	4	Unit	Baik
28	Faximile	1	Unit	Baik
29	TV	2	Unit	Baik
30	Komputer PC	3	Unit	Baik
31	Printer	33	Unit	Baik
32	UPS	1	Unit	Baik
33	Camera Digital	2	Unit	Baik
34	Laptop	59	Unit	Baik
35	Server	5	Unit	Baik
36	Lemari Es	3	Unit	Baik
37	Dispenser	1	Unit	Baik

2.2.3 Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Jumlah Sekolah dibawah kewenangan dan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama(SMP). Namun dalam rangka wajib belajar sembilan tahun, data termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)menjadi indikator kolektif tingkat capaian pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, sekaligus jenjang Raudlotul Atfal (RA). Untuk lebih jelasnya cakupan layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Data Jumlah Satuan Pendidikan dan Siswa dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

No.	Jenjang	Status		Total	Jumlah Siswa		Total
		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	TK	25	116	141	753	1.433	2.186
2	RA	-	21	21	-	582	582
3	SD	139	2	141	14.971	300	15.271
4	MI	5	9	14	471	301	772
5	SMP	49	3	52	6.394	326	6.720
6	MTS	3	8	11	170	504	674
7	SD/SMPLB	1	-	1	62	-	62

2.2.4 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dilakukanmelalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi. Berikut ini tersaji gambaran jumlah pendidik dan kependidikan untuk jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan sebaran di wilayah kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar serta berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2.2.4.1
Data Jumlah Guru Per Satuan Pendidikan di Setiap Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Guru		
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTS

2.3

1	Benteng	38	127	101
2	Bontomatene	28	138	117
3	Bontosikuyu	14	116	49
4	Bontoharu	15	109	48
5	Bontomanai	20	110	48
6	Taka Bonerate	2	66	45
7	Pasimasunggu	2	69	38
8	Buki	7	71	16
9	Pasimasunggu Timur	2	50	25
10	Pasimarannu	1	36	28
11	Pasilambena	2	53	31

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam menjalankan perannya,Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban amanat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan penerapan SPM Bidang pendidikan sebagaimana amanat

permendagri 100 tahun 2018 dengan mendasari permendikbud nomor 32 tahun 2018 yang target dan indikator penerima layanan SPM bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota harus terpenuhi setiap tahunnya. Indikator capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator jenis layanan, yaitu (1) Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD; (2) Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar; dan (3) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pada tabel 2.3.1.1 berikut gambaran capaian atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masing-masing jenis layanan, selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 2.3.1.1

Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 - 2020

No.	Jenis Layanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian(%)		Pemenuhan SPM (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	54.24	98.33
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar	100	100	94.50	99.75
		Jumlah Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	100	94.50	98.94

No.	Jenis Layanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian(%)		Pemenuhan SPM (%)	
			2019	2020	2019	2020
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	68.57	99.49

2.3.2 Kinerja Urusan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2020, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjangpendidikan. Interpretasi pelayanan yang belum/tercapai dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Capaian kinerja Angka Melek Huruf pada tahun 2020 yang telah mencapai 93,95 persen telah meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 92,90 persen. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia >15 tahun yang melek huruf dibagi dengan jumlah penduduk usia > 15 tahun dikali seratus persen.

Tabel 2.3.2.1
Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	92	92	92	92	92
2	Pasilambena	90	90	90	90	90
3	Pasimasunggu	90	90	90	90	90
4	Taka Bonerate	94	96	94	94	94
5	Pasimasunggu Timur	90	90	90	90	90
6	Bontosikuyu	96	96	94	96	96
7	Bontoharu	94	94	90	94	94
8	Benteng	90	100	90	90	100
9	Bontomanai	93	94	94	94	94
10	Bontomatene	90	94	94	94	94
11	Buki	90	90	90	90	90
Angka Melek Huruf		91.47	96.00	87.88	92.90	93.95

Grafik 1.1

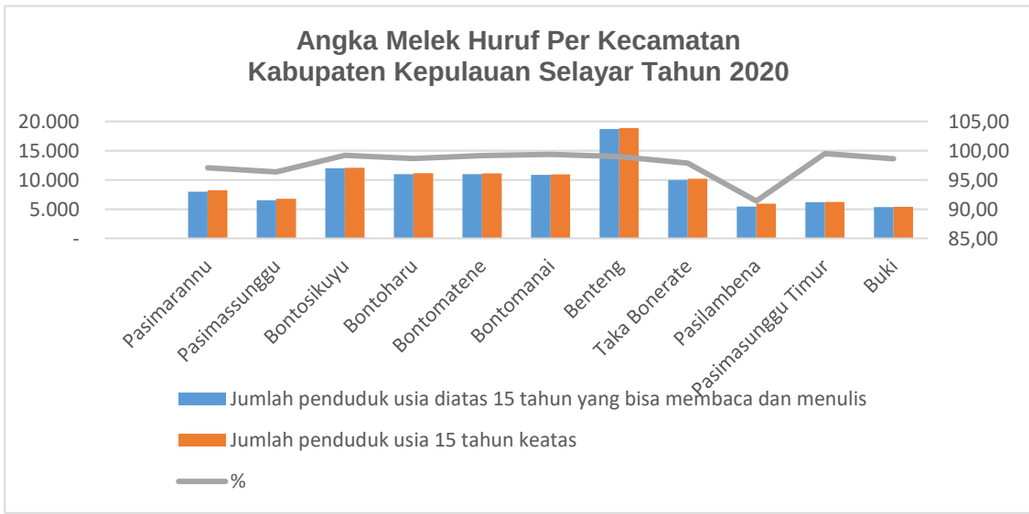

Berdasarkan grafik diatas bahwa capaian Angka Melek Huruf pada tahun 2020 berdasarkan kecamatan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa menulis di Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 105.082 orang dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sekitar 107.002 orang atau 98,20 persen. Hal iniyang dapat di interpretasikan bahwa capaian kinerja Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Selayar yang paling rendah capaian kinerja terdapat di Kecamatan Pasilambena yakni sekitar 91,40 persen disebabkan karena masih terdapat penduduk usia 15 tahun keatas yang belum terlayani sekitar 512 orang atau 8,60 persen, sehingga berdampak pada capaian yang belum sesuai dengan target, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : belum bertambahnya angka melek huruf usia 15 tahun ke atas dan/atau berkurangnya warga melek huruf dikarenakan meninggal dunia atau mutasi penduduk ke luar daerah, selain itu ada sebagian penduduk yang berkebutuhan khusus, sehingga pada usia lebih dari 15 tahun belum dapat membaca, dan/atau belum terbaharuinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca, padahal sudah melek huruf.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka Rata-rata

lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar, tercatat pada tahun 2020 adalah 9,89 persen, telah meningkat dari capaian kinerja sebelumnya 7,63 persen, yang berasal dari perhitungan dan formula jumlah penduduk usia >15 tahun yang sedang sekolah atau telah berijazah.

Tabel 2.3.2.2
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020

No	Cara Perhitungan		Target	Capaian
1	(jumlah penduduk usia >15 tahun yang sedang sekolah atau telah berijazah		12,5	9,89
	Perguruan Tinggi (16 tahun)	250.352		
	SMA/SMK (12 tahun)	179.844		
	SMP/Mts (9 tahun)	71.226		
	SD/MI (6 tahun)	187.860		
Jumlah Bobot keseluruhan				**9,89**

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dengan demikian, tabel 2.8 diatas memberikan gambaran bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,86 tahun atau setara dengan kelas X pada Sekolah Menengah Atas. Penyebab hal ini diidentifikasi bahwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi kebanyakan merantau untuk bekerja kemudian menetap di daerah lain.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bila dilihat dari capaian kinerja Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 dari target 61,00 persen telah terealisasi hanya sekitar 67,34 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja mencapai 98,81 persen dari target sebesar 63 persen, yang berasal dari perhitungan dan formula di bawah ini :

Tabel 2.3.2.3
Capaian Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Cara Perhitungan	Target (%)	Capaian (%)	Bobot (%)
1	Angka Partisipasi PAUD = (jumlah peserta didik PAUD/jumlah penduduk usia 4-6 tahun) x 100%	63	83,56	83,56
	Jumlah peserta didik PAUD		**4.975**	

	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun		**5.973**	
Jumlah Bobot Keseluruhan				**83,56**

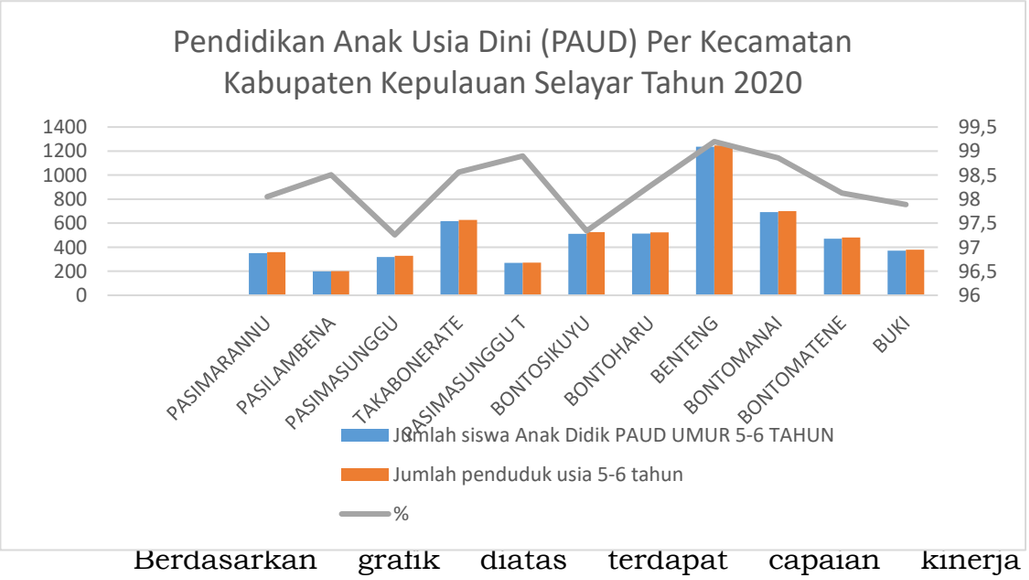

Berdasarkan grafik diatas terdapat capaian kinerja Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditentukan, dari jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak **4.975** orang dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun sekitar **5.973** orang atau 83.56 persen. Hal ini disebabkan karena semua warga masyarakat menyadari pentingnya untuk menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang Pendidikan Anak usia Dini bagi anak yang berusia 0-6 tahun melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Taman Kanak-Kanak (TK) .

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs

Bila dilihat dari capaian APK tahun 2019 untuk tingkat SD/MI-Paket A mencapai 90 persen, hingga tahun 2020 mencapai peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar 100,42 persen, sedangkan capaian APK tahun 2019 di tingkat SMP/MTs-Paket B mencapai 60 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja menjadi 62,28 persen yang berasal dari perhitungan dan formula di bawah ini:

Tabel 2.3.2.4
Capaian Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020

No	Cara Perhitungan	Target (%)	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Paket A =(jumlah peserta didik SD/MI Paket A	100	**100,42**

	/jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%		
	Jumlah peserta didik SD/MI Paket A		14.672
	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun		14.610
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts Paket B =(jumlah peserta didik SMP/Mts Paket B/jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	100	**62,28**
	Jumlah peserta didik SMP/Mts Paket B		7.555
	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun		12.130

Berdasarkan data diatas terdapat capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar SD/MI Paket A pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditentukan, dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 14.672 orang dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sekitar 14.610 orang, mencapai 100,42 Persen. Sedangkan capaian APK tahun 2020 di tingkat SMP/MTs/Paket B dari jumlah siswa pada jenjang SMP/Mts/Paket B sebanyak 7.555 orang dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sekitar 12.130 orang atau mencapai 61 persen.Adapun penyebab adanya 39 persen target yang tidak tercapai adalah karena sebagian penduduk usia 13-15 Tahun yang telah menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang melanjutkan ke luar daerah Kepulauan Selayar.

5. Angka pendidikan yang ditamatkan

Capaian kinerja pelayanan Angka Pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD/MI tahun 2016 sebanyak 96 persen, hingga tahun 2020 mencapai 100 persen. Bila diinterpretasikan capaian kinerja sesuai dengan target dan realisasi yang ingin dicapai. Sedangkan capaian kinerja untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 mencapai 100 persen, hingga tahun 2020 mencapai 100 persen. Bila diinterpretasikan capaian kinerja sesuai dengan target dan realisasi yang ingin dicapai.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs

APM adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM pada tingkat SD/MI-Paket A pada tahun 2016dari target 100 persen telah mencapai 91 persen, hingga tahun 2020 mencapai realisasi 98

persen, hal ini dapat diinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai disebabkan bahwa masih ada sekitar 2 persen usia 7 -12 tahun yang belum masuk sekolah atau sudah berada pada jenjang sekolah menengah pertama sehingga capaian kinerja 100 persen tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk APM di tingkat SMP/MTs-Paket B pada tahun 2016 mencapai 96 persen, dari target 97 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja realisasi 87 persen dari target 100 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat diinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai disebabkan masih ada sekitar 3 persen siswa dengan usia 13-15 tahun belum bersekolah atau sudah berada pada jenjang sekolah menengah atas sehingga capaian kinerja 100 persen tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

7. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/Mts

Untuk Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dari target pada tahun 2016 sebesar 99,60 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96,65 persen, hingga tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 97 persen, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Angka Partispasi Sekolah belum tercapai disebabkan karena masih terdapat sekitar 3 persen penduduk usia sekolah belum bersekolah di jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah SMP/Mts pada tahun 2016 dari target 90,36 persen telah terealisasi sebesar 86,77 persen, hingga tahun 2020 relaisasi capaian kinerja sebesar 99 persen dari target sebesar 92,68 persen, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai karena belum mencapai 100 persen. bila dilihat dari target yang ditentukan dengan realisasi capaian kinerja telah tercapai.

Tabel 2.3.2.4

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Benteng	80,53	75,09	81,53	77,09	82,53	79,09	82,53	80,09	90.53	77.09
2	Bontomatene	80,81	80,44	88,81	80,44	88,81	80,44	88,81	80,44	88.81	81.44
3	Bontosikuyu	81,17	60,64	81,17	60,64	81,17	70,64	81,17	70,64	81.17	60.64
4	Bontoharu	72,11	60,04	72,11	60,04	72,11	60,04	72,11	70,04	72.11	60.04
5	Bontomanai	72,86	37,55	72,86	37,55	72,86	37,55	72,86	37,55	72.86	37.55
6	Taka Bonerate	92,67	52,98	92,67	52,98	92,67	52,98	92,67	52,98	92.67	52.98
7	Pasimasunggu	89,81	65,42	89,81	65,42	89,81	65,42	89,81	65,42	89.81	65.42
8	Buki	65,11	24,79	65,11	24,79	65,11	24,79	65,11	24,79	65.11	24.79
9	Pasimasunggu Timur	80,88	52,29	80,88	52,29	80,88	52,29	80,88	52,29	80.88	52.29
10	Pasimarannu	91,94	55,78	91,94	55,78	92,94	60,78	92,94	60,78	91.94	55.78

11	Pasilambena	80,08	61,08	80,08	60,08	80,08	60,08	80,08	60,08	80.08	61.08
AngkaPartisipasiSekolah		**80,72**	**56,92**	**81,54**	**57,01**	**81,72**	**58,55**	**81,81**	**59,55**	**83.66**	**60.08**

8. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI dari target pada tahun 2016 sebesar 0,22 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0,86 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI terealisasi sebesar 0,5 persen dari target sebesar 0,18 persen hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Angka Putus Sekolah SD/MI belum tercapai disebabkan karena masih ada siswa yang tidak/putus sekolah. Sedangkan Angka Putus Sekolah SMP/Mts pada tahun 2016 dari taget sebesar 0,21 persen dengan realisasi capaian sebesar 1,38 persen, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan anak tidak bersekolah yang lebih cenderung membantu orang tua melaut daripada bersekolah, pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah SMP/Mts telah mencapai 0,08 persen dari taget sebesar 0,17 persen, bila dilihat dari realisasi capaian kinerja sangat menggembirakan karena sudah ada tingkat kesadaran siswa dan orang tua untuk menyuruh anaknya bersekolah. Namun bila dinterpretasikan capaian kinerja belum tercapai karena masih terdapat siswa atau anak yang tidak bersekolah.

9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 98 persen, hal ini disebabkan karena siswa tidak ikut Ujian sehingga tidak mencapai dari target 100 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 100 persen, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sudah sesuai antara target dan capaian kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan Angka Kelulusan SMP/Mts pada tahun 2016 telah mencapai 100 persen dari dari target yang telah ditentukan, hingga pada tahun 2020 angka kelulusan SMP/Mts telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja sudah sesuai dengan target dan realisasi capaian.

10. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts

Capaian kinerja Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts pada tahun 2016 mencapai 86,85 persen dari target 96,50 persen, hal ini disebabkan karena masih adanya siswa yang belum terlayani di jenjang Pendidikan formal sehingga capaian kinerja tidak mencapai

dari target yang telah ditentukan. Hingga pada tahun 2020 telah mencapai 99 persen dari target 98,50 persen yang telah ditentukan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts telah melampaui dari taget yang telah ditentukan.

11. Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/Mts kondisi Bangunan baik

Untuk capaian kinerjaSekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2016 telah mencapai 73 persen dari target 79 persen, bila dibandingkan pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 88 persen dari target sebesar 84 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Sedangkan Sekolah Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik pada tahun 2016 telah mencapai 68 persen dari target sebesar 71 persen, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 85 persen dari target 71 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja sekolah Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik telah melampaui dari target yang telah ditentukan.

12. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/Mts

Capaian Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 89,20 persen dari target 89,20 persen, hingga tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 96 persen dari target 92,68 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sekolah telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

13. Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Rasio Guru/Murid SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 10,92 guru/siswa dari target 15,50 guru/siswa, hingga tahun 2020 telah mencapai 8,50 guru/siswa dari target 28,00 guru/siswa, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya guru yang pindah dan pensiun sehingga ketersediaan guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar menjadi lebih sedikit, oleh karena itu diperlukan penyediaan guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan Rasio Guru/Murid SMP/Mts telah

mencapai 14,15 guru/siswa dari target 12,00 guru/siswa, hingga pada tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai 9 guru/siswa dari target 25 guru/siswa, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya guru yang pindah dan pensiun sehingga ketersediaan guru mata pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama menjadi lebih sedikit, oleh karena itu diperlukan penyediaan guru mata pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.3.2.5

Rasio Guru/Murid Menurut Kecamatan

KabupatenKepulauanSelayarTahun2016-2020

No	Kecamatan	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Benteng	1 : 17	1 : 15	1 : 16	1 : 13	1 : 18	1 : 14	1 : 18	1 : 14	1 : 15	1 : 10
2	Bontomatene	1 : 8	1 : 11	1 : 8	1 : 12	1 : 8	1 : 11	1 : 8	1 : 10	1 : 7	1 : 6
3	Bontosikuyu	1 : 12	1 : 16	1 : 14	1 : 16	1 : 13	1 : 15	1 : 13	1 : 15	1 : 11	1 : 9
4	Bontoharu	1 : 11	1 : 11	1 : 13	1 : 13	1 : 12	1 : 14	1 : 12	1 : 17	1 : 11	1 : 8
5	Bontomanai	1 : 9	1 : 8	1 : 10	1 : 9	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 6
6	Taka Bonerate	1 : 24	1 : 25	1 : 36	1 : 35	1 : 26	1 : 21	1 : 27	1 : 19	1 : 24	1 : 13
7	Pasimasunggu	1 : 17	1 : 21	1 : 23	1 : 27	1 : 17	1 : 23	1 : 14	1 : 20	1 : 13	1 : 12
8	Buki	1 : 7	1 : 10	1 : 6	1 : 5	1 : 7	1 : 7	1 : 6	1 : 8	1 : 6	1 : 4
9	Pasimasunggu Timur	1 : 14	1 : 17	1 : 17	1 : 27	1 : 16	1 : 18	1 : 15	1 : 15	1 : 14	1 : 12
10	Pasimarannu	1 : 28	1 : 31	1 : 54	1 : 25	1 : 32	1 : 24	1 : 38	1 : 24	1 : 37	1 : 11
11	Pasilambena	1 : 26	1 : 23	1 : 27	1 : 32	1 : 27	1 : 35	1 : 23	1 : 22	1 : 18	1 : 12
Rasio Guru/Murid		**1: 14**	**1: 15**	**1: 15**	**1: 15**	**1: 15**	**1: 15**	**1: 14**	**1: 15**	**1: 13**	**1: 9**

14. Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD/MI, SMP/Mts

Capaian kinerja Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD/MI pada tahun 2016 telah mencapai 18,54 guru/murid per kelas rata-rata dari target 16 guru/murid per kelas rata-rata, hingga tahun 2020 telah mencapai 8,50 guru/murid per kelas rata-rata dari target 20 guru/murid per kelas rata-rata, bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD/MI belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni masih kurangnya guru per kelas pada jenjang SD dan SMP.

15. Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar

Capaian kinerja Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2016 telah mencapai 80

persen dari target 81 persen, hingga pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 90 persen dari target 87 persen, bila diinterpretasikan capaian kinerja Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar telah melampaui dari target yang telah ditentukan.

16. **Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki**

Capaian kinerja Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki pada tahun 2016 telah mencapai 70 persen dari target 71 persen, hingga tahun 2020 telah mencapai 85 persen dari target 75 persen, bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan sekolah melalui Pendidikan Non Formal menjadi meningkat

17. **Penduduk berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta Aksara)**

Capaian kinerja Penduduk berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta Aksara) pada tahun 2016 telah mencapai 75 persen dari target 74 persen, hingga pada tahun 2020 telah mencapai 88 persen dari target 78 persen, bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja Penduduk berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta Aksara) telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah melalui Pendidikan Non Formal menjadi meningkat

18. **Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4**

Bila dilihat dari kualifikasi akademik pada tahun 2016 disemua jenjang pendidikan menunjukkan bahwa guru yang memenuhi kualifikasi akademik masih berkisar 75 persen dari target 83,40 persen, hingga tahun 2020 telah mencapai 81,60 persen dari target 91,50 persen yang telah ditentukan bila diinterpretasikan bahwa capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 belum tercapai. Hal ini disebakan yakni masih rendahnya standar kualifikasi akademik guru sehingga kecil kemungkinan untuk memiliki sertifikat pendidik kecuali guru yang sudah berusia 50 tahun keatas. Disamping itu juga minat dan tingkat kesadaran atau kemauan pendidik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kecil padahal untuk akses memperoleh kesempatan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah tersedia yakni di

Universitas Terbuka (UT). Hal ini juga disebabkan karena beberapa faktor yakni guru yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil, disisi lain juga masih terdapat guru yang berstatus tidak tetap sehingga kurang kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan jarak tempuh yang sangat jauh.

2.3.3 Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

Pencapaian kinerja pelayanan urusan Pemuda dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Jumlah Organisasi Pemuda**

   Capaian kinerja untuk jumlah organisasi pemuda yang aktif dan dibina di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 35 organisasi dengan Realisasi capaian sebanyak 35 organisasi. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 15 organisasi dengan realisasi menjadi 50 organisasi yang dapat dibina. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa melampaui target yang telah ditentukan.

2. **Jumlah Organisasi olahraga**

   Capaian kinerja untuk jumlah organisasi olahraga yang aktif dan dibina di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 26 organisasi dengan Realisasi capaian sebanyak 26 organisasi. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sekitar 71 organisasi dengan realisasi menjadi 97 organisasi yang dapat dibina. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa melampaui target yang telah ditentukan.

3. **Jumlah kegiatan kepemudaan**

   Capaian kinerja untuk jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 2 kegiatan dengan Realisasi capaian sebanyak 2 kegiatan. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 dari target 2 kegiatan dapat terealisasi 2 kegiatan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sama dengan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ingin dicapai.

4. **Jumlah kegiatan olahraga**

   Capaian kinerja untuk jumlah Kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 6 kegiatan dengan Realisasi capaian sebanyak 5 kegiatan. Hal ini disebabkan karena ada 1 kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 dari target 6 dapat terealisasi 5 kegiatan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai karena tidak dapat terealisasi sebanyak target yang telah ditentukan.

5. **Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)**

   Capaian kinerja untuk Gelanggang/balai remaja di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 6 gelanggang dengan Realisasi capaian sebanyak 5 gelanggang. Hal ini disebabkan karena ada 1 gelanggang yang tidak dapat dilaksanakan. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 dari target 6 dapat terealisasi 5 kegiatan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja belum tercapai karena tidak dapat terealisasi sebanyak target yang telah ditentukan.

6. **Lapangan Olahraga**

   Capaian kinerja untuk Lapangan Olahraga yang dibangun di Kabupaten Kepulauan Selayar dari target pada tahun 2016 sebanyak 29 lapangan dengan Realisasi capaian sebanyak 29 lapangan. Bila dilihat sampai tahun periode Renstra yakni tahun 2020 dari target 29 lapangan dapat terealisasi 29 lapangan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sama dengan target yang telah ditentukan dengan realisasi yang ingin dicapai.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab itu, pembangunan pendidikan perlu terus ditingkatkan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara terpadu. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong peningkatan daya saing regional. Selanjutnya urusan pemerintahan pada bidang pendidikan didaerah kabupaten/kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja sasaran perangkat daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 untuk mendukung, sasaran capaian Indikator kinerja daerah bidang pendidikan meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

tahun 2016-2021, memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai pada pelaksanaan tahun 2020, sebagai tahapan tahun kelima pelaksanaan Renstra tersebut. Berikut adalah capaian kinerja pelayanan pembangunan pendidikan dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 2.3.3.16

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK Tahun ke-					Target SPM Tahun ke-					Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat																									
1.2	Angka Melek Huruf	95,15	96,00	97,00	98,00	98,50											91,47	96,00	87,88	92,90	93,95	0,96	1,00	0,91	0,95	0,95
1.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	12,00	12,32	12,40	12,47	12,54											7,17	7,18	7,40	7,63	7,88	0,60	0,58	0,60	0,61	0,63
	Aspek Pelayanan Umum																									
	Layanan Urusan Wajib Dasar																									
	Pendidikan																									
1	**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**																									
1.1	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									54,24	98,42	0,00	0,00	0,00	0,54	0,98
1.2	Jumlah warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									94,50	95,14	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
1.3	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									68,57	51,78	0,00	0,00	0,00	0,69	0,52
2	**Indikator Kinerja Kegiatan**																									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55,09	57,00	59,00	61,00	63,00											53,07	42,15	59,00	67,34	68,00	0,96	0,74	1,00	1,10	1,08
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)																									
	a. SD/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											96,00	105,00	109,00	115,00	118,00	0,96	1,05	1,09	1,15	1,18
	b. SMP/MTs/Paket B	97,00	97,58	97,85	97,90	98,65											96,00	105,00	109,00	115,00	118,00	0,99	1,08	1,11	1,17	1,20
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											43,00	45,00	48,00	50,00	50,00	0,43	0,45	0,48	0,50	0,50
1.4	Angka Partsipasi Murni (APM)																									
	a. SD/MI/Paket A	95,75	96,62	97,73	98,56	99,02											89,08	89,65	90,15	96,65	98,94	0,93	0,93	0,92	0,98	1,00
	b. SMP/MTs/Paket B	81,72	83,42	85,24	87,38	89,64											85,45	78,79	81,16	86,77	71,63	1,05	0,94	0,95	0,99	0,80
1.5	Angka Partisipasi Sekolah																									
	a. SD/MI/Paket A	99,60	99,70	99,80	99,90	100,00											96,65	98,94	87,82	96,18	97,00	0,97	0,99	0,88	0,96	0,97
	b. SMP/MTs/Paket B	90,36	90,94	91,52	92,10	92,68											86,77	71,63	85,21	98,45	99,00	0,96	0,79	0,93	1,07	1,07

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK Tahun ke-					Target SPM Tahun ke-					Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1.6	Angka Putus Sekolah																									
	SD/MI	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18											0,86	0,50	0,08	0,28	0,50	3,91	2,38	0,40	1,47	2,78
	SMP/MTs	21,00	0,20	0,19	0,18	0,17											1,38	0,73	0,80	0,70	0,08	0,07	3,65	4,21	3,89	0,47
1.7	Angka Kelulusan (AL)																									
	SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											98,00	100,00	98,00	99,00	100,00	0,98	1,00	0,98	0,99	1,00
	SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											100,00	96,00	97,00	98,00	100,00	1,00	0,96	0,97	0,98	1,00
1.8	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50											86,85	96,00	97,00	98,00	100,00	0,90	0,99	0,99	1,00	1,02
1.9	Fasilitas Pendidikan																									
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,00	80,00	81,00	83,00	84,00											73,00	78,00	80,00	85,00	88,00	0,92	0,98	0,99	1,02	1,05
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00											68,00	71,00	75,00	80,00	88,00	0,96	1,00	1,06	1,13	1,24
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	99,60	99,70	99,80	99,90	100,00											89,20	89,78	94,56	95,09	96,00	0,90	0,90	0,95	0,95	0,96
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	96,68	96,80	97,45	97,60	97,80											80,00	83,00	88,00	85,00	86,00	0,83	0,86	0,90	0,87	0,88
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Dasar	15,00	20,00	23,00	25,00	28,00											10,92	11,48	8,04	8,04	8,50	0,73	0,57	0,35	0,32	0,30
1.13	Rasio Guru/Murid Sekolah Menengah	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00											14,15	13,48	8,83	8,83	9,00	1,18	0,90	0,49	0,44	0,36
1.14	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00											18,54	17,71	12,44	8,34	8,50	1,16	1,04	0,69	0,44	0,43
1.15	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Menengah	15,00	17,00	19,00	20,00	21,00											14,12	13,49	11,33	6,44	6,50	0,94	0,79	0,60	0,32	0,31
1.16	Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar	81,00	84,00	85,00	86,00	87,00											80,00	83,00	85,00	88,00	90,00	0,99	0,99	1,00	1,02	1,03
1.17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00											70,00	73,00	75,00	80,00	85,00	0,99	1,01	1,03	1,08	1,13
1.18	Penduduk berusia >15 Tahun Melek huruf (tidak buta Aksara)	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00											75,00	80,00	83,00	85,00	88,00	1,01	1,07	1,09	1,10	1,13
1.19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	83,40	85,32	87,48	89,52	91,50											75,00	77,00	79,00	90,00	81,60	0,90	0,90	0,90	1,01	0,89
	Aspek Pelayanan Umum																									
	Layanan Urusan Lainnya																									
2	**Pemuda dan Olahraga**																									
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda											35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga											26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	25,00	26,00	97,00	97,00	1,00	1,04	1,00	0,27	0,27
2.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan											2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4	Jumlah Kegiatan Olahraga											6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	1,20	1,00	1,20	1,20	1,20
2.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)											6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
2.6	Lapangan Olahraga											29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Berdasarkan beberapa indikator kinerja diatas, terdapat 13 indikator kinerja yang memenuhi atau sesuai dengan target yang ditetapkan dan terdapat 11 indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan pada **Tabel 2.3.3.17** sebagai berikut :

Tabel 2.3.3.17

Indikator Kinerja Yang Memenuhi dan

Tidak Memenuhi Target Yang Ditetapkan

No.	Indikator Kinerja	
	Indikator Kinerja Yang Memenuhi Target yang ditetapkan	**Indikator Kinerja Yang Tidak Memenuhi Target yang ditetapkan**
1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Melek Huruf
2.	Angka Partisipasi Kasar	Angka Rata Lama Sekolah
3.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MTS
4.	Angka Partisipasi Murni	Angka Putus Sekolah
5.	Angka Melanjutkan	Angka Kelulusan
6.	Sekolah Pendidikan SD/MI, SMP/MTS Kondisi Banguan Baik	Rasio Guru/Murid, SD/MI, SMP/MTS
7.	Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI, SMP/MTS	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata SD/MI, SMP/MTS
8.	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
9.	Rasio Angka Melek Huru Penduduk Usia 15 – 24 Tahun	Jumlah Kegiatan Olahraga
10.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	Gelanggang / Balai Remaja
11.	Jumlah Organisasi Pemuda	Lapangan Olahraga
12.	Jumlah Organisasi Olahraga	
13.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan belum berhasilnya pelayanan pada **Tabel 2.3.3.18** sebagai berikut.

Tabel 2.3.3.18

Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Keberhasilan dan Belum Berhasilnya Pelayanan

No.	Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan	Faktor Yang Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan
1.	Keinginan masyarakat/warga belajar terhadap pendidikan masih tinggi dan Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Harapan lama sekolah penduduk masih rendah dan Masih adanya anak putus sekolah
2.	Kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengembangan diri dalam meningkatan ketaqwaan dan kewirausahaan cukup tinggi	Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum tercipta bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan wawasan keilmuan
3.	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi semakin meningkat	Jumlah dan distribusi guru dan tenaga kependidikan belum merata
4.	Komitmen satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalammeningkatkan mutu pendidikan serta Dukungan pemerintah pusat terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahun tinggi	Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum optimal, Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi dan Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan
5	Dukungan Dunia Usaha / Dunia Industri dan masyarakat terhadap pendidikan meningkatsertamotivasi masyarakat untuk berprestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga meningkat	Daya saing pendidikan masih perlu di tingkatkan serta Prestasi Pemuda dan Olahraga belum optimal.

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku

serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2016 - 2020, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/ataumasyarakat kurang beruntung, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkataan pengelolaan manajemen pendidikan. Selama periode waktu 2016 - 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp 55. 264.617.103,- yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBN melalui dekonsentrasi dan pemberian subsidi blockgrant. Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2020, telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan malalui berbagai

laporan kinerja sebesar Rp 30. 849.701.396,- atau 55,82 %. Skenario penerimaan pengeluaran anggaran periode 2016 – 2020, terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.3.19

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (*					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.569.000.000	1.395.725.000	1.449.822.500	1.726.049.202	2.029.250.000	2.546.865.000	1.386.557.840	1.374.179.250	1.194.789.690	1.715.434.000	0,99	0,99	0,95	0,69	0,85	1.833.969.340	1.643.565.156
2	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	13.966.742.875	15.687.771.418	17.039.119.440	26.371.722.871	35.597.785.495	8.451.071.254	14.764.327.096	15.462.726.199	18.374.083.796	27.891.566.916	0,61	0,94	0,91	0,70	0,78	21.732.628.420	16.988.755.052
3	Program Pendidikan Menengah	4.403.559.900	-	-	-	-	2.926.095.300	-	-	-	-	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	880.711.980	585.219.060
4	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan	590.854.000	445.000.000	449.461.600	559.231.895	70.000.000	524.412.134	444.285.300	384.300.162	321.608.705	69.810.000	0,89	1,00	0,86	0,58	1,00	422.909.499	348.883.260
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	604.800.000	254.000.000	250.700.000	52.000.000	22.254.000	601.050.000	228.448.400	227.452.400	42.779.000	22.254.000	0,99	0,90	0,91	0,82	1,00	236.750.800	224.396.760
6	Program Peningkatan mutu pendidikan	861.500.000	682.440.000	648.222.500	794.116.620	101.800.000	860.834.600	670.899.400	388.520.150	683.660.520	101.751.000	1,00	0,98	0,60	0,86	1,00	617.615.824	541.133.134
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	604.800.000	254.000.000	250.700.000	52.000.000	22.254.000	601.050.000	228.448.400	227.452.400	42.779.000	22.254.000	0,99	0,90	0,91	0,82	1,00	236.750.800	224.396.760
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	650.800.000	-	1.588.445.000	-	-	625.800.000	-	1.562.520.400	-	-	0,96	0,00	0,98	0,00	0,00	447.849.000	437.664.080
9	Program Peningkatan pembinaan prestasi olahraga pelajar	1.628.000.000	-	-	-	-	1.601.301.275	-	-	-	-	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325.600.000	320.260.255
10	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.035.000.000	-	-	-	-	831.186.175	-	-	-	-	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000.000	166.237.235
11	Program Pelayanan Administrasi	3.355.000.000	26.219.753.837	26.191.936.935	28.112.645.831	31.441.161.040	2.675.739.410	5.442.295.213	5.104.395.838	7.586.423.143	7.265.668.297	0,80	0,21	0,19	0,27	0,23	23.064.099.529	5.614.904.380
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.319.339.160	1.812.566.160	1.350.063.640	801.853.750	345.000.000	460.681.500	1.601.546.615	990.081.490	453.570.113	316.145.046	0,35	0,88	0,73	0,57	0,92	1.125.764.542	764.404.953
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000	575.000.000	259.377.300	536.231.052	20.000.000	154.656.000	477.787.768	191.843.500	131.199.834	18.000.000	0,97	0,83	0,74	0,24	0,90	310.121.670	194.697.420

14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	170.000.000	372.000.000	218.540.833	100.613.365	40.510.459	137.243.000	372.000.000	173.245.633	23.508.075	40.510.459	0,81	1,00	0,79	0,23	1,00	180.332.931	149.301.433
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	220.000.000	804.222.500	225.500.000	22.254.000	-	210.567.528	605.677.290	170.335.731	19.909.000	0,00	0,96	0,75	0,76	0,89	254.395.300	201.297.910
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	374.948.000		535.000.000		-	333.183.590		262.611.096		0,00	0,89	0,00	0,49	0,00	181.989.600	119.158.937
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	730.000.000	228.222.500	160.061.000	622.254.000	-	710.767.928	196.849.618	133.777.532	621.732.465	0,00	0,97	0,86	0,84	1,00	348.107.500	332.625.509
18	Program Pendidikan Non Formal	-	707.170.000	-	3.464.029.000	1.790.327.000	-	703.060.150		2.753.373.958	1.781.994.063	0,00	0,99	0,00	0,79	1,00	1.192.305.200	1.047.685.634
19	Program Peningkatan kompetensi SDM Tenaga Budaya	-	-	-	73.000.000	-	-	-	-	72.500.000	-	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	14.600.000	14.500.000
20	Program Pengembangan	-	-	294.222.500	-	-	-	-	270.646.537	-	-	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	58.844.500	54.129.307
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	7.099.853.339	-	-	-	-	3.521.591.200	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.970.668	704.318.240
22	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	861.500.000	-	-	-	-	860.834.600	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300.000	172.166.920

Berdasarkan Tabel 2.13 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik pada kegiatan pengadaan administrasi perkantoran yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 38,57% dan rata-pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 42,11%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragaadalah ada beberapa program yang mengalami perubahan karena adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Pendidikan Nasional menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayarboleh dikatakan masih sangat kurang.Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang rata-rata membutuhkan serapan anggaran yang besar, seperti pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil, dukungandigitalisasi bidang pendidikan dan lain-lain. Sebagai daerah yang letak geografisnya terdiri dari kepulauan kebutuhan masyarakat akan pemerataan akses dan layanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil perlu menjadi prioritas utama.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah pendidik untuk setiap jenjang pendidikan yang berada di daerah kepulauan serta kurangnya kualitas pendidik yang mendukung modernisasi pendidikan, sehingga dibutuhkan adanya pemetaan tenaga pendidik secara tepat dan juga pengembangan kemampuan para pendidik dalam menerapkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan bidang pendidikan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang terkait pembangunan bidang pendidikan guna mendapatkan kucuran dana pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disadari bahwa usaha dari dalam lingkungan internal saja sangat tidak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tentunya terkait dengan keterbatasan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, selain dari lingkungan internal Dinas Perndidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, lingkungan eksternal tentunya sangat pula diharapkan partisipasi dan kerjasamanya. Lingkungan eksternal tersebut seperti OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintahan di tingkat level yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata disegala lapisan masyarakat. Dari keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tentunya akan mendorong dan menjadi penopang peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pariwisata, perekonomian, perikanan, pertanian dan sebagainya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan anatara lain sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi dan penduduknya yang berdomisili menyebar di gugusan pulau-pulau yang terpisah dari ibukota Kabupaten. Kondisi keterpisahan ini harus didukung dengan infrastuktur (aksesibilitas) yang memadai untuk mewujudkan akses terhadap informasi pendidikan yang ter*update*.
2. Pemenuhan hak terhadap pendidikan
   Ketika rintisan wajib belajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda pembangunan Pendidikan, masih ada beberapa masalah

dalam pelaksanaannya yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Capaian indeks pendidikan kurang optimal pada tahun 2020 dilihat dari angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,86 yang berarti rata-rata Pendidikan masyarakat baru setara kelas X SMA.
2. Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan siswa ke depan yang ditandai dengan rendahnya lama sekolah menyebabkan tidak diperolehnya manfaat pendidikan (return to education) sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang memberi pendapatan lebih tinggi di daerah perkotaan. Salah satu penyebab adalah masih adanya angka putus sekolah pada tahun 2020 mencapai orang. Secara umum banyak penyebab siswa putus sekolah, diantaranya penyebab dapat bersumber dari siswa yang bermasalah, atau lingkungan dan nilai keluarga yang belum kondusif termasuk kapasitas guru dalam menangani siswa yang bermasalah dan lain sebagainya. Selain itu, motivasi belajar dan dukungan dari orang tua masih relative rendah dan tidak ada sangsi hukum bagi orang tua siswa yang mengijinkan anaknya tidak melanjutkan sekolah.
3. Angka melek huruf mencapai 93,96 persen berarti mengandung pengertian bahwa sekitar 93,96 persen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, Adapun 7,04 persen masyarakat lainnya masih buta huruf. Adapun sisa dari jumlah penduduk yang buta aksara merupakan kategori penduduk tidak produktif atau lanjut usia.
4. Peningkatan Kualitas pembelajaran belum maksimal

   Kualitas pembelajaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran dilihat dari segi kemampuan pedagogig dan professional masih kurang serta belum meratanya penyebaran tenaga pengajar dalam melayani siswa dari semua jenjang pendidikan. Hal lain adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah, telah

berdampak pada sulitnya mengantisipasi pengaruh luar yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti siswa. Rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan terutama guru honor, juga berdampak pada rendahnya kinerja, sehingga sulit untuk meningkatkan mutu proses dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

5. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
   Kualitas sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan minimal. Selama 5 (lima) tahun kedepan terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani yakni ruang kelas. Ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan ruang ibadah.
6. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu
   merencanakandanmelaksanakanprogramsecaraoptimal;
   Dalam manajemen dan tata Kelola Pendidikan meliputi perencanaan, dukungan kepala sekolah, manajemen keuangan, tata layanan (dewan Pendidikan dan komite sekolah), manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah dan kebijakan. Pelaksanaan tata Kelola Pendidikan tersebut diperlukan penguatan peran pelaku pada keseluruhan pemangku kepentingan Pendidikan samapi jenjang Pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan.
7. Penyediaan sarana dan prasaran aolahraga yang ada diklub maupun kelompok masyarakat masih kurang dan optimal,sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk peningkatan kondisi sarana prasarana sekaligus Pemeliharaan Rutin/Berkala;
8. Kurang maksimalnya Pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi
9. Antisipasi pemuda dari adanya pergaulan bebas/penyalahgunaan penggunaannarkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang- barang terlarang tersebut akibat rendahnya tingkat moral dikalangan pemuda masih sulit diantisipasi dan ditanggulangi .

10. Terbatasnya kemampuan APBD pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk fokus membiayai pembangunan di sektor pendidikan sehingga dibutuhkan bantuan berupa dana maupun sarana baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di samping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada pemeratan akses dan layanan pendidikan untuk mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain:

1. Pemenuhan hak atas Pendidikan dilakukan dengan adanya bantuan dana lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI.SMP/MTs dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan.
2. Meningkatkan Kualitas pembelajaran dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi sertifikasi standar kompotensi guru, peningkatan kemampuan guru bidang studi dan peningkatan mutu peserta didik. Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi memadai pada berbagai bidang disiplin ilmu dapat diberdayakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai wilayah termasuk di daerah terpencil sehingga terdapat penyebaran guru yang merata di setiap jenjang Pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dilakukan dengan cara Pembangunan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah yang mengharuskan penyediaan dana sebesar 20 persen bagi pendidikan dan Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan infrastruktur dasar pada sektor pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peningkatan optimalisasi tata Kelola Pendidikan dengan tingginya tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara peningkatan kompotensi dan sumber daya manusia dengan cara

penggunaan teknologi dan informasi yang berkembang pesat yang dapat mendukung aktivitas lebih efektif dan efesien, sederhana dan cepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat manajemen aparatur sipil negara, serta mendorong aktif dan meningkatkan kemampuan pelaku pendidikan sampai pada masing-masing jenjang pendidikan, membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama serta mensinergikan peran pelaku Pendidikan sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan.

5. Pengembangan sentra olahraga masyarakat.
6. Pengembangan sentra olahraga masyarakat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana olahraga atau fasilitas lapangan olahraga masyarakat di kecamatan.
7. Peningkatan olahraga prestasi dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan olahraga dimasyarakat yang diarahkan pada pemberian penghargaan terhadap para pemuda berprestasi dan pengembangan pusat pelatihan olahraga prestasi.
8. Pembinaan mental pemuda dan menggalakkan gerakan disiplin nasional, pemahaman wawasan kebangsaan sehingga Antisipasi pemuda dari adanya pergaulan bebas/ penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang - barang terlarang tersebut dapat ditanggulangi.dan optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan melalui peningkatan peran kepemudaan dilakukan dengan cara Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda sehingga dapat berpartispasi dalam kegiatan ekonomi mandiri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan di sisi lain kehidupan di masyarakat menentukan kebermaknaan hasil pendidikan, untuk itu proses pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum meratanya akses Pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat	Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat	Pendirian sekolah berdasarkan angka pertumbuhan penduduk usia sekolah
2	Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai	Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum sesuai Standar Pelayanan Minimal	Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan masih terkendala pada status tanah dan luas bangunan sekolah yang tidak memadai
3	Jumlah dan distribusi guru yang tidak proporsional	Masih kurangnya jumlah pendidik yang ada di kabupaten Kepulauan Selayar	Perpindahan pendidik yang tidak berdasarkan rasio kebutuhan guru disekolah
4	Pendidik yang belum tersertifikasi pada Lembaga PAUD	Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD	Pendirian Lembaga PAUD yang berstatus swasta tidak berdasarkan Kualifikasi S-1/D-IV Pendidik yang mengajar
5	Kurangnya buku mata pelajaran Muatan Lokal di Sekolah	Penyediaan buku mata pelajaran Muatan Lokal di Sekolah belum dilaksanakan	Penyediaan buku mata pelajaran Muatan Lokal belum diprioritaskan

Dari Tabel Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung untuk pelayanan Pendidikan yang berbasis elektronik dan jumlah pegawai yang relevan dengan tupoksi, hal tersebut disebabkan belum memenuhi Standar Minimal sehingga layanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Pemenuhan hak terhadap pendidikan dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :
    a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
    b. Masih adanya Unit sekolah baru atau Satap yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
    c. Masih kekurangan guru yang berstatus ASN disekolah berdasarkan Rasio guru/kelas;
    d. Masih terdapat guru yang sudah berusia > 45 tahun yang belum berkualifikasi S-1/D-IV;
    e. Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD;
    f. Masih kurangnya pelaksanaan Diklat Calon Pengawas
    g. Penghargaan dan kesejahteraan bagi pendidik disebabkan karena masih kurangnya Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan, bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil.
3. Belum adanya Pengembangan dan Penyusunan kompotensi Dasar Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah sehingga Penetapan Kurikulum mata pelajaran muatan lokal masih kurang;
4. Belum optimalnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra karena belum adanya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturnya lintas daerah.
5. Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah.
6. Belum optimalnya pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan SDM dalam kegiatan ekonomi mandiri karena terbatasnya tenaga

terampil dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kreativitas SDM kepemudaan.

7. Potensi olahraga tradisional belum dikelola dan dikembangkansecara optimal karena masih terbatasnyatenaga profesional dalam pengembangan olahragatradisional.
8. Pembentukanwatak dan karakter pemudamelalui ajangkompetisi IPTEK masihterbatas belumtersedianya systeminformasi yang lebihmemadai.
9. Belumoptimalnyakegiatan promosi danpemberian rewardataupenghargaan kepadaparaatlit yang berprestasi di bidang olahraga karena rendahnyaperhatian pemerintahterhadap paraatlit yang berprestasi di bidang olahraga.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, visi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5(lima) tahun ke depan, adalah :

"***KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA"***

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

Bandar Maritim : Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

Kawasan Timur : Menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi "Bandar Maritim" merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan "Kawasan Pusat Distribusi

Logistik”

2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021-2026, yaitu :

1. *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan*

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. *Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan*

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan

pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan parwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program Prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Priorotas

tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khususs (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia", berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub Kawasan, yaitu :
   a. Sub Kawasan Utama Logistik pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
   b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
   d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
   e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub Kawasan, yaitu :
   a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
   b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
   c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
   d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
   e. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Polassi.
   f. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
   g. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
   a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
   b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea.
   d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
   e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai

penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari merupakan dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

5. Program RPJMD

   Adapun program pembangunan daerah pada sektor Pendidikan, adalah sebagai berikut :

   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   4) Program Pengelolaan Pendidikan
   5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
   6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
   7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan memiliki prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelajutan di bidang Pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang Pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan informasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan.
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan informasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disdikbud	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Belum meratanya akses Pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat	Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat	Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat
		Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai	masih adanya Unit sekolah baru atau Satap yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkelanjutan
		Jumlah dan distribusi guru yang tidak proporsional	Perlu dipetakan kembali penempatan guru di Satuan Pendidikan berdasarkan Daftar Keadaan Guru (DKG)	Adanya penyebaran guru yang merata pada Satuan Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang	Pendidik yang belum tersertifikasi pada Lembaga PAUD	Masih rendahnya Standar kualifikasi pendidik pada Lembaga PAUD	Penerimaan guru pada Lembaga PAUD sesuai standar kualifikasi pendidik
		Masih rendahnya guru yang memiliki	Masih terdapat guru yang sudah berusia > 45 tahun	Tersedianya guru kelas dan guru mata pelajaran yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disdikbud	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kualifikasi S-1/D-IV	yang belum berkualifikasi S-1/D-IV	
		Kurangnya Pengawas	Perlu diadakan diklat Diklat Calon Pengawas	Adanya diklat Diklat Calon Pengawas
		Kompetensi Guru	Guru kurang mengusai 4 komptensi yg seharusnya dimiliki (Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional)	Adanya pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
		Penghargaan dan Kesejahteraan bagi Pendidik	Perlu adanya Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan , bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil.	Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan, bagi pendidik yang berprestasi dan bertugas di Wilayah sangat terpencil.
3	Menguatnya karakter peserta didik	Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mampu menjangkau ke hampir seluruh wilayah	Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter siswa dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disdikbud	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan	Belum optimalnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Masih adanya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra yang penuturnya Lintas daerah	Terdapat beberapa Bahasa dan sastra yang perlu dikembangkan dan dilindungi
5	Menguatnya tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Pelayanan pendidikan belum efektif dan efisien	Kurangnya Sarana Prasarana pendukung untuk pelayanan Pendidikan berbasis elektronik	Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan memuat langkah-langkah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan :

1. Membangun koordinasi dan Kerjasama lintas SKPD, lintas pemerintahan dan lintas stakeholder lainnya untuk kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan system pendataan/informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan tekhnis fungsional
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan

Arah kebijakan pembangunan bidang Pendidikan periode 2018-2023 diarahkan pada :

1. Perluasan akses layanan Pendidikan yang merata dan bermutu
2. Penyelarasan Pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
3. Penerapan metodologi Pendidikan bermakna, Pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa
4. Penataan struktur, akuntabilitas kelembagaan pendidikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Rumusan tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012. Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan. Tujuan Khusus Penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut :

a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;

f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;

h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;

i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

   Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

   1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
   2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
   3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
   4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;

5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.

c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek

wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;

2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.

k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan

kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

l. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Berdasarkan kajian analisis struktur ruang kabupaten, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan gambaran tentang rencana penetapan perkotaan dan perdesaan, rencana penetapan hirarki perkotaan, rencana sistem dan fungsi kegiatan perwilayahan dan rencana prasarana pendukung wilayah untuk mengintegrasikan sistem perwilayahan yang diharapkan. Menurut fungsi kegiatan, rencana struktur ruang wilayah kabupaten

merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di setiap titik memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaansarana dan prasarana pendidikan di setiap titik mengingat wilayah Kabupaten KepulauanKepulauan Selayar memiliki kondisi geografis berupa pulau-pulau yang terpisah. Hal ini mengakibatkan konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tidak tersebar secara merata, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus memberikan perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dalam rencana pembangunan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 lebih ditentukan oleh kebutuhan mendesak saat ini dan berorientasi ke depan serta kesesuaiannya dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisis serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam

menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis melalui analisis faktor-faktor lingkungan berikut ini :

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal
    a. Kekuatan (Strengths)
        1) Tupoksi dan rincian tugas yang jelas dan mudah dipahami
        2) Komitmen kinerja yang cukup baik dari aparatur pengelola Pendidikan
        3) SDM pengelola Pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik
        4) Capaian SPM bidang Pendidikan yang meningkat
        5) adanya program prioritas muatan lokal berbasis potensi daerah
        6) Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
        7) stakeholders pendidikan memiliki kemauan untuk memahami Visi dan Misi RPJMD
    b. Kelemahan (Weakness)
        1) Pelaksanaan tupoksi belum optimal
        2) Koordinasi belum menjangkau seluruh stakeholder
        3) Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pengelolaan di bidang Pendidikan
        4) Masih adanya anak putus sekolah
        5) Kerjasama internal dan lintas sectoral belum optimal
        6) Penghargaan/reward belum optimal
        7) Keterbatasan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan
2. Analisis Faktor Eksternal
    a. Peluang (Opportunities)
        1) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim
        2) Dukungan anggaran 20 persen dari Pemerintah untuk pendidikan
        3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
        4) Program Unggulan GERBANGSARI sebagai penopang meningkatnya ekonomi perdesaan
        5) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan mulai meningkat

6) Kesempatan melanjutkan pendidikan meningkat
7) ada peluang kerjasama *stakeholder* yang relevan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas

b. Ancaman (Threats)
1) Keterbatasan kemampuan masyrakat dalam menerima arus informasi teknologi dan komunikasi
2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum merata
3) Lunturnya nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda
4) Kebijakan antar sektoral yang tidak mendukung keberhasilan pendidikan

Beberapa isu strategis yang perlu diakomodir dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Akses pendidikan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat
2. Infrastruktur dasar dan fasilitas Pendidikan yang memadai
3. Jumlah dan distribusi guru yang proporsional
4. Pendidik tersertifikasi pada Lembaga PAUD dan guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV
5. Buku mata pelajaran muatan lokal disekolah yang memadai
6. Pengembangan dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
7. Optimalisasi peran dan fungsi organisasi pemuda
8. Optimalisasifasilitasi, pendampingan dan peningkatan prestasi olahraga
9. Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pelopor
10. Sarana dan prasarana olahraga kabupaten yang memadai
11. Pemberian reward atau penghargaan kepada atlet berprestasi
12. Frekuensi penyelenggaraan festival dan olahraga rekreasi/wisata, petualang

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan

dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"***. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.**
2. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**.
3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.**
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman**.**
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-2, terkait dengan **tujuan ke-2** : meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan (T-2) dengan **sasaran ke-3**, yaitu meningkatnya

kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian pedesaan (S-3).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-3, terkait dengan **tujuan ke-3** : meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia (T-3) dengan **sasaran ke-4**, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (S-4).

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seperti yang dikemukakan di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	7,56 (C)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (BB)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	71,85	75,00	80,00	82,00	84,00	85,00
			Nilai Sakip OPD	49,77 (C)	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)
			Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	98,42%	100%	100%	100%	100%	100 %
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikanDasar	95,14%	100%	100%	100%	100%	100 %
			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang	93,96%	100%	100%	100%	100%	100 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan						
3.	Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Jenjang TK/SD/SMP	Meratanya Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk Jenjang TK/SD/SMP	Rasio Guru Per Peserta Didik untuk jenjang Pendidikan TK/SD/SMP/SKB	70	80	85	90	92	95
			Rasio Kepala Sekolah bersertifikat Cakep Per Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan TK/SD/SMP/SKB	70	80	85	90	92	95
			Persentase Guru yang berkualifikasi S1/DIV	70	80	85	90	92	95
			Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	70	80	85	90	92	95
4.	Mengembangkan pendidikan karakter berbasis Kearifan Lokal	Meningkatnya kualitas pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal potensi daerah yang ditetapkan	1 : 9	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal potensi daerah yang sesuai standar	1 : 9	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
			Jumlah Pendidik yang dilatih Penyusunan	1 : 9	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pendidikan Nonformal	Kurikulum Muatan Lokal sesuai standar						
5.	Mengoptimalkan pembelajaran yang berorientasi pada potensi daerah	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Cakupan Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	5	10	15	0	22	30
6.	Mewujudkan pelestarian budaya dan pengembangan bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	5	10	15	20	22	30
7.	Mewujudkan Insan Olahraga dan Pemuda yang kreatif, terampil dan Mandiri	Meningkatnya Pemuda yang produktif, berdaya saing, dan mandiri	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	5	10	15	20	2	30
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	5	10	15	20	22	30

Tabel 4.2

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau		Persentase Capaian Akses Layanan Pendidikan yang Sesuai Standar Nasional Pendidikan	80,00	85,00	90,00	95,00	100
		Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100	100	100	100	100
			Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	47,15	60,00	65,00	70,00	75,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,26	60,00	65,00	70,00	75,00
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,44	60,00	65,00	70,00	75,00
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	50,98	60,00	65,00	70,00	75,00
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	74,07	80,00	85,00	90,00	95,00
			Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan DIV	52,93	60,00	65,00	70,00	75,00
			Indeks Iklim Keamanan SD	77,94	80,00	85,00	90,00	95,00
			Indeks Iklim Keamanan SMP	83,02	85,00	90,00	95,00	100,00
			Indeks Iklim Kebhinekaan SD	73,43	75,00	80,00	85,00	90,00
			Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	83,02	85,00	90,00	95,00	100,00
			Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	70,82	75,00	80,00	85,00	90,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	74,58	75,00	80,00	85,00	90,00
2	Meningkatkan Prestasi Generasi Muda		Cakupan Pembinaan Prestasi Generasi Muda	10	15	20	22	30
		Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	10	15	20	22	30
			Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10	15	20	22	30
3	Mewujudkan Nilai Reformasi Birokrasi Disdikpora		Indeks Reformasi Birokrasi	50,00	51,00	54,00	55,00	60,00
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	80,00	82,00	84,00	85,00
			Nilai SAKIP OPD	50,00	51,00	54,00	55,00	60,00
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah unutk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah *(value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Lima tahun kedepan.

Strategi dasar pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan pada perubahan kondisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang lebih baik dalam rangka menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP). Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis. Tiap strategi menjelaskan berbagai komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Pembangunan sektor pendidikan memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threaths*) merupakan factor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Lingkungan Internal

   KEKUATAN/ STRENGTHS (S)

   a. Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah diatas rata-rata nasional;
   b. Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah pusat;
   c. Tingginya partisipasi pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui penyediaan dana BOSDA;
   d. Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di setiap kecamatan;
   e. Animo masyarakat terhadap terselenggaranya pendidikan anak usia dini cukup tinggi;

f. Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan cukup besar;
g. Tingginya animo masyarakat dalam bidang olahraga;
h. Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELEMAHAN/ WEAKNESS (W)

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum seluruhnya memenuhi SPM;
b. Penggunaan dana BOS belum memenuhi seluruh kebutuhan sekolah;
c. Penyaluran dana BOSDA khususnya dana transportasi terhambat akibat terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Selayar;
d. Penyebaran guru yang tidak merata;
e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini belum merata;
f. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
g. Minimnya sarana dan prasarana dalam hal pengembangan potensi olahraga.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG / OPPURTUNITIE (O)

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan;
b. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
c. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam peningkatan angka melanjutkan sekolah guna melanjutkan rintisan wajib belajar 12 tahun; d. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi); maupun Kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
e. Kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini cukup besar;
f. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik.
g. Meningkatnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan potensi pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar.

ANCAMAN / THREATS(T)

a. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembangunan sektor pendidikan;
b. Terhambatnya pelaporan penggunaan dana BOS online akibat belum terjangkaunya jaringan internet di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga menghambat penyaluran pada triwulan berikutnya;
c. Belum terpenuhinya anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang sebesar 20% dari APBD, diluar gaji pegawai;
d. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki wilayah yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
e. Perekrutan PNS tenaga guru belum memenuhi analisis kebutuhan jabatan.
f. Belum maksimalnya anggaran untuk perluasan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar.
g. Minimnya ketersediaan anggaran untuk pembinaan kepemudaan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dideskripsikan di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. STRATEGI S-O
    a. Memperluas daya tampung fasilitas pendidikan dengan cara mendirikan unit satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
    b. Memaksimalkan penggunaan dana BOS guna memenuhi kebutuhan operasional dan sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah;
    c. Mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
    d. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan baik kualitas maupun kuantitas;
    e. Memfasilitasi pendirian PAUD di setiap desa yang memenuhi persyaratan;

f. Mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan.

2. STRATEGI W-O
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
   b. Menetapkan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS);
   c. Penyaluran dana BOSDA guna memenuhi kekurangan dana BOS dan digunakan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa semua jenjang pendidikan se-Kabupaten KepulauanSelayar;
   d. Penyebaran guru yang merata;
   e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan anak usia dini;
   f. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
3. STRATEGI S-T
   a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas baru di semua jenjang pendidikan;
   b. Menyediakan jaringan internet kepada pengelola dana BOS di sekolah agar pelaporan dana BOS ke pusat dapat berjalan dengan lancar sehingga penyaluran dana BOS per triwulan ke sekolah tidak terhambat;
   c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan melaui program penyediaan dana BOSDA;
   d. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
   e. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
   f. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
4. STRATEGI W-T
   a. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan pendidikan guna membangun fasilitas unit sekolah baru (USB);
   b. Menganggarkan dana BOSDA sesuai kebutuhan pendidikan di satuan program pendidikan pada semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF pada jalur pendidikan non formal;
d. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata di semua jenjang pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
e. Pemerintah harus concern dalam peningkatan sarana dan prasarana guna mengembangkan potensi.

Tabel 5.1
Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar		
INTERNAL **EKSTERNAL**	**Strenght (S)** **(Kekuatan)**	**Weakness (W)** **(Kelemahan)**
Opportunity (O) **(Peluang)**	**Strategi S-O** 1. Memperluas daya tampung fasilitas pendidikan dengan cara mendirikan unit satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2. Memaksimalkan penggunaan dana BOS guna memenuhi kebutuhan operasional dan sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah; 3. Mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun; 4. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan baik kualitas maupun kuantitas; 5. Memfasilitasi pendirian PAUD di setiap desa yang memenuhi persyaratan; 6. Mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap jenjang Pendidikan	**Strategi W-O** 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2. Menetapkan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS); 3. Penyaluran dana BOSDA guna memenuhi kekurangan dana BOS dan digunakan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar; 4. Penyebaran guru yang merata; 5. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan anak usia dini; 6. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan
TREATHS (T) **(Ancaman)**	**Strategi S-T** 1. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas baru di semua jenjang pendidikan; 2. Menyediakan jaringan internet kepada pengelola dana BOS di sekolah agar pelaporan dana BOS ke pusat dapat berjalan dengan lancar sehingga penyaluran dana BOS per triwulan ke sekolah tidak terhambat; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan melaui program penyediaan dana BOSDA; 4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.	**Strategi W-T** 1. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan pendidikan guna membangun fasilitas unit sekolah baru (USB); 2. Menganggarkan dana BOSDA sesuai kebutuhan pendidikan di satuan program pendidikan pada semua jenjang pendidikan se-Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF pada jalur pendidikan non formal; 4. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata di semua jenjang pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Pemerintah harus concern dalam peningkatan sarana dan prasarana guna mengembangkan potensi.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi : **Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**.			
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan 1 :	Sasaran 1 :	Strategi 4 :	Arah Kebijakan 4. :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2.Meningkatkan Nilai SAKIP OPD 3.Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inivasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	1.Pengintegrasian perencanaan, pengendalaian dan evaluasi pembangunan daerah 2.Pengembangan dan inflemantasi e- Government
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan			
Tujuan 2	Tujuan 2 :	Strategi :	Arah Kebijakan :
Meningkatkan keberdayaan Masyarakat pedesaan	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Pedesaan	Mewujudkan Insan Olahraga yang Berprestasi	Mewujudkan Insan Olahraga yang Berprestasi
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan 3	Sasaran 4 :	Startegi 1 :	Arah Kebijakan :
Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber daya Manusia	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel 5.3 Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Visi : **Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**.			
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan : 3	Sasaran : 4	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan Akses layanan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1. Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Infrasturktur Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1. Mensin ergikan Kebijakan Pemerintah dengan Kolaborasi para Pemangku Kepentingan dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah 2. Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Infrasturktur Pendidikan 3. Kebijakan Pemenuhan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan			
Tujuan: 2	Sasaran: 3	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Prestasi Generasi Muda	Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatkan Sistem Pembinaan Pemuda 2. Meningkatkan Sistem Pembinaan Prestasi Olahraga	Merumuskan dan Mengimplementasikan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas menuju berprestasi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan : 1	Sasaran: 1	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Nilai Reformasi Birokrasi Disdikpora	Meningkatnya Kepercayaan Masayarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	1.Pengintegrasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2.Pengembangan dan inplementasi e-Government

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang/Sub Bidang Penanggung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100**	**276.662.543.987**	**100**	**279.850.054.214**	**100**	**281.854.701.070**	**100**	**293.736.345.349**	**100**	**300.744.894.550**	**100**	**300.744.894.550**		
		1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**100**	**52.720.674.000**	**100**	**52.842.420.027**	**100**	**49.165.065.800**	**100**	**55.464.485.729**	**100**	**56.787.868.358**	**100**	**56.787.868.358**		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**50,91**	**63,03**	**223.478.024.487**	**70,28**	**226.537.438.642**	**70,53**	**232.207.670.731**	**71,51**	**237.778.332.752**	**72,31**	**243.451.723.772**	**72,31**	**243.451.723.772**		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	**79,35**	**83,00**		**85,00**		**88,00**		**91,00**		**95,00**		**95,00**			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80**	**100**	**390.000.000**	**100**	**395.100.000**	**100**	**406.000.000**	**100**	**413.000.000**	**100**	**421.000.000**	**100**	**421.000.000**		
	Meningkatnya tertib Administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.100.000	2 Dokumen	66.000.000	2 Dokumen	73.000.000	2 Dokumen	81.000.000	2 Dokumen	81.000.000		

				01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
				01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
				01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
				01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
				01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
				01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
				01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100%**	**100%**	**202.084.101.487**	**100%**	**205.715.661.642**	**100%**	**208.422.130.731**	**100%**	**212.690.792.752**	**100%**	**218.563.183.772**	**100%**	218.563.183.772		
				01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	1692 Orang/Bulan	1657 Orang/Bulan	201.655.101.487	2245 Orang/Bulan	205.254.761.642	2245 Orang/Bulan	207.977.130.731	2245 Orang/Bulan	212.250.792.752	2245 Orang/Bulan	218.085.183.772	2245 Orang/Bulan	218.085.183.772		
				01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		

				01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	17.500.000	4 Dokumen	21.000.000	4 Dokumen	24.000.000	4 Dokumen	27.000.000	4 Dokumen	27.000.000		
				01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	2 Dokumen	187.000.000	2 Dokumen	202.000.000	2 Dokumen	222.000.000	2 Dokumen	222.000.000		
				01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	32.000.000	1 Laporan	32.000.000		
				01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	32.000.000		
				01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	26.400.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000		
				01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000		
				01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditangani**	**100 Persen**	**100**	**1.620.000.000**	**100**	**1.692.000.000**	**100**	**1.755.000.000**	**100**	**1.758.000.000**	**100**	**1.762.000.000**	100	1.762.000.000		
				01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	-		
				01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket		Paket	-		

				01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	32.000.000	12 Dokumen	32.000.000		
				01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000		
				01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000		
				01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pengawai Pensiun yang Dipulangkan	-	30 Orang	200.000.000	35 Orang	210.000.000	40 Orang	220.000.000	40 Orang	220.000.000	40 Orang	220.000.000	40 Orang	220.000.000		
				01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000		
				01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	20 Orang	200.000.000	20 Orang	210.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	220.000.000		
				01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000		
				01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000		
				01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000		
				01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi umum yang ditangani**	**100 Persen**	**100**	**2.146.000.000**	**100**	**2.146.100.000**	**100**	**2.287.000.000**	**100**	**2.447.000.000**	**100**	**2.608.000.000**	**100**	2.608.000.000		

				01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	1 Paket	15.000.000	1 Paket	17.000.000	1 Paket	21.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.000.000		
				01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	61.000.000	12 Paket	66.100.000	12 Paket	73.000.000	12 Paket	81.000.000	12 Paket	90.000.000	12 Paket	90.000.000		
				01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000		
				01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000		
				01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	-	2 Paket	200.000.000	2 Paket	66.000.000	2 Paket	73.000.000	2 Paket	81.000.000	2 Paket	90.000.000	2 Paket	90.000.000		
				01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000		
				01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000		
				01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000		
				01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	715.000.000	1 Laporan	790.000.000	1 Laporan	880.000.000	1 Laporan	970.000.000	1 Laporan	970.000.000		
				01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Arsip Dinamis	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
				01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	1 Dokumen	352.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000		

				01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**5.830.000.000**	**100**	**5.830.000.000**	**100**	**5.900.000.000**	**100**	**5.980.000.000**	**100**	**5.550.000.000**	100	5.550.000.000		
				01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
				01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
				01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
				01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
				01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
				01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000		
				01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000		
				01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000		
				01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000		
				01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	730.000.000	1 Unit	730.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	880.000.000	1 Unit	950.000.000	1 Unit	950.000.000		

				01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	-	1 Unit	-		
				01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**8.807.923.000**	**100**	**8.615.577.000**	**100**	**11.276.540.000**	**100**	**12.309.540.000**	**100**	**12.342.540.000**	100	12.342.540.000		
				01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000		
				01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	187.923.000	1 Laporan	200.923.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	255.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	280.000.000		
				01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	36.000.000		
				01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	-	1 Laporan	8.500.000.000	1 Laporan	8.292.654.000	1 Laporan	10.926.540.000	1 Laporan	11.926.540.000	1 Laporan	11.926.540.000	1 Laporan	11.926.540.000		
				01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**2.600.000.000**	**100**	**2.143.000.000**	**100**	**2.161.000.000**	**100**	**2.180.000.000**	**100**	**2.205.000.000**	100	2.205.000.000		
				01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78 Unit	78 Unit	100.000.000	78 Unit	110.000.000	78 Unit	125.000.000	78 Unit	140.000.000	78 Unit	160.000.000	78 Unit	160.000.000		

				01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
				01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
				01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
				01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
				01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
				01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
				01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		
				01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	500.000.000	4 Unit	33.000.000	4 Unit	36.000.000	4 Unit	40.000.000	4 Unit	45.000.000	4 Unit	45.000.000		
				01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	-		
				01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	-		

				01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-		
Meningkatkan layanan Pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua jenjang pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan SD	1	01	02			**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%)	-	100	52.299.149.000	100	52.415.124.350	100	48.727.074.912	100	55.015.987.439	100	56.328.668.900	100	56.328.668.900		
								Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)		100		100		100		100		100		100			
								Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		100		100		100		100		100		100			
		1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)**	-	**100**	**25.455.865.937**	**100**	**27.573.649.772**	**100**	**23.469.048.633**	**100**	**28.541.390.955**	**100**	**28.755.880.936**	**100**	**28.755.880.936**		
		1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
		1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	5 Ruang	947.500.000	1 Ruang	189.500.000	1 Ruang	189.500.000	1 Ruang	189.500.000	1 Ruang	189.500.000	1 Ruang	189.500.000		

		1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	3 Ruang	500.000.000	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	16 Unit	2.886.498.000	16 Unit	3.193.269.000	10 Unit	1.561.479.354	16 Unit	3.806.811.000	16 Unit	3.806.811.000	16 Unit	3.806.811.000		
		1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 unit	127.030.500	1 unit	127.030.500	1 unit	127.030.500	1 unit	127.030.500	1 unit	127.030.500	1 unit	127.030.500		
		1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	6 Ruang	810.000.000	6 Ruang	810.000.000	6 Ruang	1.215.000.000	6 Ruang	1.215.000.000	6 Ruang	1.485.000.000	6 Ruang	1.485.000.000		
		1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	5 Ruang	500.000.000	Ruang	-	4 Ruang	496.694.470	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	5 Ruang	500.000.000	Ruang	-	5 Ruang	500.000.000	5 Ruang	500.000.000	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	5 Ruang	500.000.000	Ruang	-	5 Ruang	500.000.000	5 Ruang	500.000.000	Ruang	-		
		1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	5 Unit	322.217.875	5 Unit	500.000.000	Unit	-	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	Unit	-		
		1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	1 unit	106.800.000	1 unit	106.800.000	1 unit	106.800.000	1 unit	106.800.000	1 unit	106.800.000	1 unit	106.800.000		

		1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000		
		1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	3 paket	2.799.757.529	3 paket	2.909.733.280	3 paket	2.909.733.281	3 paket	3.249.733.281	3 paket	2.909.733.280	3 paket	2.909.733.280		
		1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	141 Peserta Didik	15.385.650.000	141 Peserta Didik	15.385.650.000	141 Peserta Didik	15.385.650.000	141 Peserta Didik	15.385.650.000	141 Peserta Didik	16.154.932.500	141 Peserta Didik	16.154.932.500		
		1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	2 Paket	100.000.000	5 Paket	500.000.000	Paket		5 Paket	500.000.000	Paket		Paket			
		1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	141 Satuan Pendidikan	60.000.000	141 Satuan Pendidikan	65.000.000	141 Satuan Pendidikan	80.000.000	141 Satuan Pendidikan	75.000.000	141 Satuan Pendidikan	75.000.000	141 Satuan Pendidikan	75.000.000		

		1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	Satuan Pendidikan	61.548.061	Satuan Pendidikan	66.549.773	Satuan Pendidikan	95.000.000	Satuan Pendidikan	100.000.000	Satuan Pendidikan	110.000.000	Satuan Pendidikan	110.000.000		
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	242 Peserta Didik	242.000.000	242 Peserta Didik	72.000.000	65 Peserta Didik	75.000.000	65 Peserta Didik	65.000.000	65 Peserta Didik	65.000.000	65 Peserta Didik	65.000.000		
		1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	141 Satuan Pendidikan	426.863.972	141 Satuan Pendidikan	468.117.219	141 Satuan Pendidikan	513.855.498	141 Satuan Pendidikan	514.171.704	141 Satuan Pendidikan	516.073.656	141 Satuan Pendidikan	516.073.656		
		1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	141 Satuan Pendidikan	60.000.000	141 Satuan Pendidikan	60.000.000	141 Satuan Pendidikan	70.000.000	141 Satuan Pendidikan	70.000.000	141 Satuan Pendidikan	70.000.000	141 Satuan Pendidikan	70.000.000		
		1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	141 Peserta Didik	60.000.000	141 Peserta Didik	60.000.000	141 Peserta Didik	70.000.000	141 Peserta Didik	70.000.000	141 Peserta Didik	70.000.000	Peserta Didik	70.000.000		

		1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang	5 Ruang	500.000.000	Ruang			
		1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	11 Unit	60.000.000	11 Unit	60.000.000	11 Unit	70.000.000	11 Unit	70.000.000	11 Unit	70.000.000	11 Unit	70.000.000		
	Meningkatknya akses dan mutu pendidikan SMP	1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)**	-	**100**	**18.626.983.644**	**100**	**17.487.409.646**	**100**	**17.680.618.395**	**100**	**18.682.217.539**	**100**	**19.567.053.683**	**100**	**18.680.046.656**		
		1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	2 Ruang	500.000.000	1 Ruang	1.000.000.000	1 Ruang	1.105.000.000	1 Ruang	601.000.000	1 Ruang	948.000.000	1 Ruang	948.000.000		
		1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	300.000.000	1 Ruang	301.802.809	1 Ruang	302.875.000	1 Ruang	350.300.000	1 Ruang	340.300.000	1 Ruang	340.300.000		
		1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	105.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	110.000.000		

		1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit	350.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.105.000.000	1 Unit	652.500.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000		
		1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	2 Unit	400.000.000	2 Unit	780.000.032	2 Unit	781.250.000	2 Unit	890.000.000	2 Unit	900.000.000	2 Unit	900.000.000		
		1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit		1 Unit	327.924.805	Unit		Unit		Unit		Unit			
		1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Unit	660.000.000	3 Unit	1.319.000.000	3 Unit	1.325.000.000	3 Unit	773.800.000	3 Unit	803.000.000	3 Unit	803.000.000		
		1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	Unit	-		
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	10 Ruang	1.500.000.000	3 Ruang	656.000.000	3 Ruang	657.250.000	3 Ruang	770.000.000	3 Ruang	850.000.000	3 Ruang	850.000.000		
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	2 Ruang	387.007.027	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	5 Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	5 Ruang	1.000.000.000	1 Ruang	220.000.000	1 Ruang	225.195.000	1 Ruang	266.200.000	1 Ruang	292.820.000	1 Ruang	292.820.000		
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Ruang	400.000.000	2 Ruang	430.000.000	2 Ruang	440.660.500	2 Ruang	532.400.000	2 Ruang	600.700.000	2 Ruang	600.700.000		
		1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-		
		1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	280.000.000	1 Unit	321.000.000	1 Unit	325.400.000	1 Unit	484.390.000	1 Unit	392.000.000	1 Unit	392.000.000		
		1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit	312.500.000	2 Unit	343.750.000	2 Unit	350.748.000	2 Unit	415.937.500	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000		
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit	120.000.000	2 Unit	142.000.000	2 Unit	170.946.749	2 Unit	300.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000		
		1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	1Paket	75.000.000	1Paket	90.000.000	1Paket	99.000.000	1Paket	108.900.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000		
		1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-	52 Paket	1.617.285.520	52 Paket	1.580.000.000	52 Paket	1.480.000.000	52 Paket	1.753.800.000	52 Paket	1.820.000.000	52 Paket	1.820.000.000		
		1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	52 Peserta Didik	8.828.300.000	52 Peserta Didik	8.528.300.000	52 Peserta Didik	8.824.054.200	52 Peserta Didik	9.711.130.000	52 Peserta Didik	9.447.173.356	52 Peserta Didik	9.447.173.356		
		1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-		
		1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	-	100 Peserta Didik	100.000.000	100 Peserta Didik	120.000.000	100 Peserta Didik	140.000.746	100 Peserta Didik	165.000.000	6.234 Peserta Didik	181.500.000	6.234 Peserta Didik	181.500.000		
		1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	100 Satuan Pendidikan	60.000.000	100 Satuan Pendidikan	94.632.000	100 Satuan Pendidikan	105.968.200	100 Satuan Pendidikan	116.250.039	52 Satuan Pendidikan	127.866.300	52 Satuan Pendidikan	127.866.300		
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	100 Peserta Didik	63.898.124	100 Peserta Didik	73.000.000	100 Peserta Didik	74.270.000	100 Peserta Didik	90.750.000	50 Peserta Didik	95.825.000	50 Peserta Didik	95.825.000		
		1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			

		1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksankan pembinaan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-		
		1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	30.000.000	1 Satuan Pendidikan	30.000.000	1 Satuan Pendidikan	31.000.000	1 Satuan Pendidikan	39.930.000	1 Satuan Pendidikan	39.932.000	1 Satuan Pendidikan	39.932.000		
		1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	1 Orang	32.000.000	1 Orang	39.930.000	52 Orang	30.930.000	52 Orang	30.930.000		
		1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang			
		1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang			
		1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-7 Tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)**	-	**100**	**5.174.799.419**	**100**	**4.672.364.932**	**100**	**4.813.771.425**	**100**	**4.971.868.568**	**100**	**5.145.775.425**	**100**	**5.145.775.425**		

		1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-	1 Unit	96.667.000	1 Unit	106.333.700	1 Unit	116.967.070	1 Unit	128.663.777	1 Unit	141.530.155	1 Unit	141.530.155		
		1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	5 Unit	500.000.000	3 Unit	434.791.500	3 Unit	478.270.650	3 Unit	526.097.715	3 Unit	578.707.487	3 Unit	578.707.487		
		1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	5 Unit	500.000.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	2233 Paket	33.495.000	2233 Paket	36.844.500	2233 Paket	40.528.950	2233 Paket	44.581.845	2233 Paket	49.040.030	2233 Paket	49.040.030		
		1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	500 Paket	392.432.000	500 Paket	431.675.200	500 Paket	474.842.720	500 Paket	522.326.992	500 Paket	574.559.691	500 Paket	574.559.691		
		1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	3.579 Peserta Didik	35.000.000	1 Peserta Didik	36.000.000	1 Peserta Didik	39.600.000	1 Peserta Didik	43.560.000	3.579 Peserta Didik	47.916.000	3.579 Peserta Didik	47.916.000		

		1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	3 Paket	75.000.000	3 Paket	76.000.000	3 Paket	83.600.000	3 Paket	91.960.000	3 Paket	101.156.000	3 Paket	101.156.000		
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Peserta Didik	55.000.000	1 Peserta Didik	60.500.000	1 Peserta Didik	64.000.000	1 Peserta Didik	70.400.000	1 Peserta Didik	77.440.000	1 Peserta Didik	77.440.000		
		1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	11 Satuan Pendidikan	25.000.000	11 Satuan Pendidikan	27.500.000	11 Satuan Pendidikan	30.250.000	11 Satuan Pendidikan	33.275.000	11 Satuan Pendidikan	36.602.500	11 Satuan Pendidikan	36.602.500		
		1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	167 Satuan Pendidikan	229.405.419	167 Satuan Pendidikan	229.920.032	167 Satuan Pendidikan	252.912.035	167 Satuan Pendidikan	278.203.239	167 Satuan Pendidikan	306.023.562	167 Satuan Pendidikan	306.023.562		
		1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000	167 Satuan Pendidikan	3.232.800.000		
		1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	-	-		
		1	01	02	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Kesetaraan	1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	**100%**	**3.041.500.000**	**100%**	**2.681.700.000**	**100%**	**2.763.636.459**	**100%**	**2.820.510.377**	**100%**	**2.859.958.856**	**1**	**2.859.958.856**		
		1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	-		
		1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	2 Unit	600.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000		
		1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		
		1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	1 Paket	127.000.000	1 Paket	139.700.000	1 Paket	153.670.000	1 Paket	169.037.000	1 Paket	185.940.700	1 Paket	185.940.700		
		1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik	-		
		1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	121.000.000	1 Paket	133.100.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	146.410.000		
		1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-		
		1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Satuan Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-		
		1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			

		1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	4 Satuan Pendidikan	175.000.000	4 Satuan Pendidikan	192.500.000	4 Satuan Pendidikan	249.466.459	4 Satuan Pendidikan	278.873.377	4 Satuan Pendidikan	288.108.156	4 Satuan Pendidikan	288.108.156		
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	4 Satuan Pendidikan	2.039.500.000	1 Satuan Pendidikan	2.039.500.000	4 Satuan Pendidikan	2.039.500.000	4 Satuan Pendidikan	2.039.500.000	4 Satuan Pendidikan	2.039.500.000	4 Satuan Pendidikan	2.039.500.000		
		1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang			
		1	01	02	2.04	19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang			
		1	01	02	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang		Ruang			
		1	01	02	2.04	21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			

		1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian		Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan			
Mengoptimalkan pembelajaran yang berorientasi pada potensi daerah	Meningkatnya kualitas pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Potensi Daerah Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	c	01	03			**Program Pengembangan Kurikulum**	**Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar**	**-**	**100**	**96.000.000**	**100**	**97.314.240**	**100**	**99.750.015**	**100**	**102.143.018**	**100**	**104.580.151**	**100**	**104.580.151**		
		1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan**		**100**	**96.000.000**	**100**	**97.314.240**	**100**	**99.750.015**	**100**	**102.143.018**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		
		1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	97.314.240	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		
		1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	1390 Buku	-	1390 Buku	-	1390 Buku	99.750.015	1390 Buku	-	1390 Buku	-	1390 Buku	-		
		1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	102.143.018	80 Orang	-	80 Orang	-		
		1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	-	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**104.580.151**	**100**	**104.580.151**		

		1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	104.580.151	1 Dokumen	104.580.151		
		1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	**-**	Buku		Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-		
Meningkatkan layanan Pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	**1**	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum**	**-**	**100**	**281.322.500**	**100**	**285.173.805**	**100**	**292.311.705**	**100**	**299.324.263**	**100**	**306.466.140**	**100**	**306.466.140**		
		1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**-**	**100**	**281.322.500**	**100**	**285.173.805**	**100**	**292.311.705**	**100**	**299.324.263**	**100**	**306.466.140**	**100**	**306.466.140**		
		1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	**-**	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		

								Formal/Kesetaraan															
		1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan non Formal/Kesetaraan	-	1 Laporan	181.322.500	1 Laporan	185.173.805	1 Laporan	192.311.705	1 Laporan	199.324.263	1 Laporan	206.466.140	1 Laporan	206.466.140		
		1	**01**	**05**	**2,02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		1	01	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		1	01	05	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		

		1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
Mewujudkan pelestarian budaya dan pengembangan bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra	1	01	06			**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah**	-	**100**	**44.205.500**	**100**	**44.807.632**	**100**	**45.929.167**	**100**	**47.031.008**	**100**	**48.153.168**	**100**	**48.153.168**		
		1	01	06	2.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**100**	**44.205.500**	**100**	**44.807.632**	**100**	**45.929.167**	**100**	**47.031.008**	**100**	**48.153.168**	**100**	**48.153.168**		
		1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	**-**	100 Kamus	44.205.500	Kamus	-	Kamus	-	Kamus	-	Kamus	-	Kamus	-		
		1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	**-**	Bahasa	-	Bahasa	44.807.632	Bahasa	-	Bahasa	-	Bahasa	-	Bahasa	-		
		1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	Publikasi	-	Publikasi	-	100 Publikasi	45.929.167	Publikasi	-	Publikasi	-	Publikasi	-		
		1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang	**-**	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	47.031.008	Orang	-	Orang	-		

								Mendapat Penghargaan															
		1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	48.153.168	Buku	48.153.168		
		1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	Peserta Didik	-		
		1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**463.845.500**		**470.195.545**		**481.964.540**		**493.526.869**		**505.302.419**		**505.302.419**		
Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya Pemuda yang produktif, berdaya saing, dan mandiri	2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	-	4,20	200.000.000	8,83	202.738.000	5,00	207.812.532	30,01	212.797.955	82,00	217.875.314	82,00	217.875.314		
		2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor**	-	**100**	**200.000.000**	**100**	**202.738.000**	**100**	**207.812.532**	**100**	**212.797.955**	**100**	**217.875.314**	**100**	**217.875.314**		

		2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		

		2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	-	75 Orang	200.000.000	75 Orang	202.738.000	75 Orang	207.812.532	75 Orang	212.797.955	75 Orang	217.875.314	75 Orang	217.875.314		
		2	19	02	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	-	**100**	**83.760.985**	**100**	**89.099.999**	**100**	**93.792.850**	**100**	**98.331.057**	**100**	**107.098.402**	**100**	**107.098.402**		

		2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	30 Orang	45.540.680	30 Orang	47.554.468	35 Orang	48.000.000	35 Orang	48.331.057	40 Orang	52.098.402	45 Orang	52.098.402		
		2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	30 Dokumen	38.220.305	35 Dokumen	41.545.531	40 Dokumen	45.792.850	50 Dokumen	50.000.000	50 Dokumen	55.000.000	50 Dokumen	55.000.000		
	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2	19	03			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Peningkatan Prestasi Olahraga	-	**0,39**	**165.200.000**	**0,77**	**167.461.588**	**1,53**	**171.653.152**	**3,03**	**175.771.111**	**6,00**	**179.965.009**	**6,00**	**179.965.009**		
		2	19	03	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	-	**100**	**165.200.000**	**100**	**167.461.588**	**100**	**171.653.152**	**100**	**175.771.111**	**100**	**179.965.009**	**100**	**179.965.009**		
		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	10 Unit	165.200.000	10 Unit	167.461.588	10 Unit	171.653.152	10 Unit	175.771.111	10 Unit	179.965.009	10 Unit	179.965.009		
		2	19	03	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persaentase keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	-	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	-	Orang	-	Orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-		
		2	19	03	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	-	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	Orang	-	Orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-		

		2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	-	Pelatda	-	Pelatda	-	Pelatda	-	Pelatda	-	Pelatda	-	Pelatda	-		
		2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	-	Orang	-	Orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-		
		2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	Orang	-	Orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-		
		2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-		
		2	19	03	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	-	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-		
		2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-		
		2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-		
		2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	-	organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-		

							Keolahragaan Berprestasi														
		2	19	03	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
		2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	Dokumen	-	Dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-		
		2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-		
		2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
	Meningkatknya Peran Serta Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, dan organisasi Sosial kemasyarakatan	2	19	04			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	-	4,06	98.645.500	4,26	99.995.957	4,51	102.498.856	4,75	104.957.803	5,00	107.462.096	5,00	107.462.096		

		2	19	04	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	-	**100**	**98.645.500**	**100**	**99.995.957**	**100**	**102.498.856**	**100**	**104.957.803**	**100**	**107.462.096**	**100**	**107.462.096**		
		2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-		
		2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	6 Orang	98.645.500	6 Orang	99.995.957	6 Orang	102.498.856	6 Orang	104.957.803	6 Orang	107.462.096	6 Orang	107.462.096		
		2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-		
		2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-		

Tabel 6.2

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 -5889 Tahun 2021)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang/ Sub Bidang Penanggung-jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100**	**276.662.543.987**	**100**	**279.850.054.214**	**100**	**281.854.701.070**	**100**	**293.736.345.349**	**100**	**300.744.894.550**	**100**	**300.744.894.550**		
		1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**100**	**52.720.674.000**	**100**	**52.842.420.027**	**100**	**49.165.065.800**	**100**	**55.464.485.729**	**100**	**56.787.868.358**	**100**	**56.787.868.358**		
Mewujudkan Nilai Reformasi Birokrasi Disdikpora	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat daerah			01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**50,91**	**63,03**	**223.478.024.487**	**70,28**	**226.537.438.642**	**70,53**	**232.207.670.731**	**71,51**	**237.778.332.752**	**72,31**	**243.451.723.772**	**72,31**	**243.451.723.772**		
								Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	**79,35**	**83,00**		**85,00**		**88,00**		**91,00**		**95,00**		**95,00**				
				01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen/laporan perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang diselesaiakn tepat waktu	80	100	390.000.000	100	395.100.000	100	406.000.000	100	413.000.000,00	100	421.000.000	100	421.000.000		
				01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	50.000.000,0	2	55,100,000	2	66,000,000	2	73,000,000	2	81,000,000	2	81.000.000		
				01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	20.000.000,0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20.000.000		

								Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)															
				01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20.000.000		
				01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
				01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
				01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000,0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
				01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	1	1	100.000.000,0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
				01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat	100	100	202.084.101.487	100	205.715.661.642	100	208.422.130.731	100	212.690.792.752	100	218.563.183.772	100	218.563.183.772		
				01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1692	1657	201,655,101,487	2245	205,254,761,642	2245	207,977,130,731	2245	212,250,792,752	2245	218.085.183.772	2245	218.085.183.772		
				01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100.000.000		

				01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	4	15,000,000	4	17,500,000	4	21,000,000	4	24,000,000	4	27,000,000	4	27.000.000		
				01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	170,000,000	2	187,000,000	2	187,000,000	2	202,000,000	2	222,000,000	2	222.000.000		
				01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	32,000,000	1	32.000.000		
				01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	2	28,000,000	2	32,000,000	2	32.000.000		
				01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	24,000,000	12	26,400,000	12	30,000,000	12	33,000,000	12	37,000,000	12	37.000.000		
				01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	5	28.000.000		

				01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	100	1.620.000.000	100	1.692.000.000	100	1.755.000.000	100	1.758.000.000	100	1.762.000.000	100	1.762.000.000		
				01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai (Unit)	0	1	100,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130.000.000		
				01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	20,000,000	12	22,000,000	12	25,000,000	12	28,000,000	12	32,000,000	12	32.000.000		
				01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220.000.000		
				01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220.000.000		
				01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	30	200,000,000	35	210,000,000	40	220,000,000	40	220,000,000	40	220,000,000	40	220.000.000		

				01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220.000.000		
				01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (Orang)	0	20	200,000,000	20	210,000,000	20	220,000,000	20	220,000,000	20	220,000,000	20	220.000.000		
				01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300.000.000		
				01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000		
				01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000		
				01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admninitrasi umum kantor	100	100	2.146.000.000	100	2.146.100.000	100	2.287.000.000	100	2.447.000.000	100	2.608.000.000	100	2.608.000.000		
				01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	15,000,000	1	17,000,000	1	21,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	28.000.000		
				01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	61,000,000	12	66,100,000	12	73,000,000	12	81,000,000	12	90,000,000	12	90.000.000		

				01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan (Paket)	0	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200.000.000		
				01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	0	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200.000.000		
				01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	0	2	200,000,000	2	66,000,000	2	73,000,000	2	81,000,000	2	90,000,000	2	90.000.000		
				01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110.000.000		
				01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200.000.000		
				01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	100,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120.000.000		
				01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	650,000,000	1	715,000,000	1	790,000,000	1	880,000,000	1	970,000,000	1	970.000.000		

				01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen)	1	1	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	1	100.000.000		
				01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	320,000,000	1	352,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	1	500.000.000		
				01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100	100	5.830.000.000	100	5.830.000.000	100	5.900.000.000	100	5.980.000.000	100	5.550.000.000	100	5.550.000.000		
				01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotoryang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit)	0	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200.000.000		
				01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200.000.000		
				01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200.000.000		
				01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	4,000,000,000	1	4,000,000,000	1	4,000,000,000	1	4,000,000,000	1	4,000,000,000	1	4.000.000.000		
				01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	730,000,000	1	730,000,000	1	800,000,000	1	880,000,000	1	950,000,000	1	950.000.000		

				01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit)	0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	0	1	0		
				01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	8.807.923.000	100	8.615.577.000	100	11.276.540.000	100	12.309.540.000	100	12.342.540.000	100	12.342.540.000		
				01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	100,000,000		
				01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	187,923,000	0	200,923,000	0	225,000,000	0	255,000,000	0	280,000,000	0	280.000.000		
				01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	36,000,000	1	36.000.000		
				01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	8,500,000,000	1	8,292,654,000	1	10,926,540,000	1	11,926,540,000	1	11,926,540,000	5	11.926.540.000		

				01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	100	2.600.000.000	100	2.143.000.000	100	2.161.000.000	100	2.180.000.000	100	2.205.000.000	100	2.205.000.000		
				01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	78	78	100,000,000	78	110,000,000	78	125,000,000	78	140,000,000	78	160,000,000	390	160.000.000		
				01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
				01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		

				01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
				01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200.000.000		
				01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200.000.000		
				01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200.000.000		
				01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
				01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4	500,000,000	4	33,000,000	4	36,000,000	4	40,000,000	4	45,000,000	4	45.000.000		

				01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500.000.000		
				01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500.000.000		
				01	2.09	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1	01	02			**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%)	-	100	52.299.149.000	100	52.415.124.350	100	48.727.074.912	100	55.015.987.439	100	56.328.668.900	100	56.328.668.900		
								Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)		100		100		100		100		100		100			
								Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		100		100		100		100		100		100			

		1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100	100	25.455.865.937	100	27.573.649.772	100	23.469.048.633	100	28.541.390.955	100	28.755.880.936	100	28.755.880.936		
		1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	5	947,500,000	1	189,500,000	1	189.500.000	1	189.500.000	1	189,500,000	1	189.500.000		
		1	01	02	2.01	03	pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	04	pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	3	500,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	05	pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	06	pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	16	2,886,498,000	16	3,193,269,000	10	1.561.479.354	16	3.806.811.000	16	3,806,811,000	16	3.806.811.000		
		1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	127,030,500	1	127,030,500	1	127.030.500	1	127.030.500	1	127,030,500	1	127.030.500		

		1	01	02	2.01	08	rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang DirehabilitasiSedang/Berat (Ruang)	0	6	810,000,000	6	810,000,000	6	1.215.000.000	6	1.215.000.000	6	1,485,000,000	6	1.485.000.000		
		1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/KepalaSekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	5	500,000,000	0	-	4	496.694.470	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	10	rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit KesehatanSekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	5	500,000,000	0	-	5	500.000.000	5	500,000,000	5	500.000.000		
		1	01	02	2.01	11	rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	5	500,000,000	0	-	5	500.000.000	5	500,000,000	5	500.000.000		
		1	01	02	2.01	12	rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi (Unit)	5	5	322,217,875	5	500,000,000	0	-	5	500.000.000	5	500,000,000	5	500.000.000		
		1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0	1	106,800,000	1	106,800,000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106,800,000	1	106.800.000		
		1	01	02	2.01	14	pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1,000,000,000	1	1.000.000.000		

		1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yangTersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	3	2,799,757,529	3	2,909,733,280	3	2.909.733.281	3	3.249.733.281	3	2.909.733.280	15	2.909.733.280	
		1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yangTersedia (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung danRuangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	141	15,385,650,000	141	15,385,650,000	141	15.385.650.000	141	15.385.650.000	141	16,154,932,500	141	16.154.932.500	

		1	01	02	2.01	22	pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	0	2	100,000,000	5	500,000,000	0	-	5	500.000.000	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagiPeserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	0	141	60,000,000	141	65,000,000	141	80.000.000	141	75.000.000	141	75,000,000	141	75.000.000	
		1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	0	141	61,548,061	141	66,549,773	141	95.000.000	141	100.000.000	141	110,000,000	141	110.000.000	
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	242	242,000,000	65	72,000,000	65	75.000.000	65	65.000.000	65	65,000,000	65	65.000.000	
		1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	
		1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	

		1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yangDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0	141	426,863,972	141	468,117,219	141	513.855.498	141	514.171.704	141	516,073,656	141	516.073.656		
		1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola DanaBOS (Satuan Pendidikan)	0	141	60,000,000	141	60,000,000	141	70.000.000	141	70.000.000	141	70,000,000	141	70.000.000		
		1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang MeningkatKapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	0	141	60,000,000	141	60,000,000	141	70.000.000	141	70.000.000	141	70,000,000	141	70.000.000		
		1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yangTelah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	5	500,000,000	5	500.000.000		
		1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	11	60,000,000	0	60,000,000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	70,000,000	0	70.000.000		

		1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100	100	18.626.983.644	100	17.487.409.646	100	17.680.618.395	100	18.682.217.539	100	19.567.053.683	100	19.567.053.683		
		1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	2	500,000,000	1	1,000,000,000	1	1.105.000.000	1	601.000.000	1	948,000,000	6	948.000.000		
		1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	300,000,000	1	301,802,809	1	302.875.000	1	350.300.000	1	340,300,000	5	340.300.000		
		1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	2,000,000,000	1	100,000,000	1	105.000.000	1	120.000.000	1	110,000,000	5	110.000.000		

		1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	350,000,000	1	1,000,000,000	1	1.105.000.000	1	652.500.000	1	600,000,000	5	600.000.000		
		1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	2	400,000,000	2	780,000,032	2	781.250.000	2	890.000.000	2	900,000,000	10	900.000.000		
		1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	0	0	1	327,924,805	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun (Unit)	0	3	660,000,000	3	1,319,000,000	3	1.325.000.000	3	773.800.000	3	803,000,000	3	803.000.000		
		1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	5	500.000.000	5	500,000,000	5	500.000.000		
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	10	1,500,000,000	3	656,000,000	3	657.250.000	3	770.000.000	3	850,000,000	3	850.000.000		
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	2	387,007,027	2	387.007.027		

		1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit KesehatanSekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	5	1,000,000,000	1	220,000,000	1	225.195.000	1	266.200.000	1	292,820,000	1	292.820.000		
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Ruang)	0	2	400,000,000	2	430,000,000	2	440.660.500	2	532.400.000	2	600,700,000	2	600.700.000		
		1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas KepalaSekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	280,000,000	1	321,000,000	1	325.400.000	1	484.390.000	1	392,000,000	1	392.000.000		

		1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0	2	312,500,000	2	343,750,000	2	350.748.000	2	415.937.500	2	300,000,000	2	300.000.000		
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2	120,000,000	2	142,000,000	2	170.946.749	2	300.000.000	2	500,000,000	2	500.000.000		
		1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	75,000,000	1	90,000,000	1	99.000.000	1	108.900.000	1	300,000,000	1	300.000.000		
		1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yangTersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	0	52	1,617,285,520	52	1,580,000,000	52	1.480.000.000	52	1.753.800.000	52	1,820,000,000	260	1.820.000.000		
		1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung danRuangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		

		1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang DilaksanakanPemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	52	8,828,300,000	52	8,528,300,000	52	8.824.054.200	52	9.711.130.000	52	9,447,173,356	52	9.447.173.356		
		1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yangTersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yangTersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagiPeserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ProsesBelajar dan Ujian (Peserta Didik)	0	100	100,000,000	100	120,000,000	100	140.000.746	6234	165.000.000	6234	181,500,000	6234	181.500.000		

		1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertamayang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	0	100	60,000,000	100	94,632,000	100	105.968.200	52	116.250.039	52	127,866,300	52	127.866.300		
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	100	63,898,124	100	73,000,000	100	74.270.000	50	90.750.000	500	95,825,000	500	95.825.000		
		1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yangDilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		

		1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah MenengahPertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yangMengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	31.000.000	1	39.930.000	1	39,932,000	1	39.932.000		
		1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	32.000.000	52	39.930.000	52	30,930,000	52	30.930.000		
		1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			
		1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	5.174.799.419	100	4.672.364.932	100	4.813.771.425	100	4.971.868.568	100	5.145.775.425	100	5.145.775.425		
		1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/RuangGuru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	96,667,000	1	106,333,700	1	116.967.070	1	128.663.777	1	141,530,155	1	141.530.155		

		1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Telah Dibangun (Unit)	0	5	500,000,000	3	434,791,500	3	478.270.650	3	526.097.715	3	578,707,487	3	578.707.487		
		1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	5	500,000,000	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/RuangGuru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		

		1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	0	2233	33,495,000	2233	36,844,500	2233	40.528.950	2233	44.581.845	2233	49,040,030	2233	49.040.030		
		1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yangTersedia (Paket)	0	500	392,432,000	500	431,675,200	500	474.842.720	500	522.326.992	500	574,559,691	500	574.559.691		
		1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang MenerimaBiaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	3579	35,000,000	3579	36,000,000	3579	39.600.000	3579	43.560.000	3579	47,916,000	3579	47.916.000		
		1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yangTersedia (Paket)	0	3	75,000,000	3	76,000,000	3	83.600.000	3	91.960.000	3	101,156,000	3	101.156.000		
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	0	1	55,000,000	1	60,500,000	1	64.000.000	1	70.400.000	1	77,440,000	1	77.440.000		
		1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	0	11	25,000,000	11	27,500,000	11	30.250.000	11	33.275.000	11	36,602,500	11	36.602.500		
		1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada PAUD (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		

		1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan PembinaanKelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	167	229,405,419	167	229,920,032	167	252.912.035	167	278.203.239	167	306,023,562	167	306.023.562		
		1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	167	3,232,800,000	167	3,232,800,000	167	3.232.800.000	167	3.232.800.000	167	3,232,800,000	167	3.232.800.000		
		1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-		
		1	01	02	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		
		1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100	100	3.041.500.000	100	2.681.700.000	100	2.763.636.459	100	2.820.510.377	100	2.859.958.856	100	2.859.958.856		

		1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	0	2	600,000,000	2	200,000,000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200,000,000	10	200.000.000		
		1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDirehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat PembangunanSarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNon Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNon Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		

		1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	1	127,000,000	1	139,700,000	1	153.670.000	1	169.037.000	1	185,940,700	1	185.940.700		
		1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146,410,000	1	146.410.000		
		1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ProsesBelajar (Peserta Didik)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		

		1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	4	175,000,000	4	192,500,000	4	249.466.459	4	278.873.377	4	288,108,156	4	288108156		
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	4	2,039,500,000	4	2,039,500,000	4	2.039.500.000	4	2.039.500.000	4	2,039,500,000	4	2.039.500.000		

		1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan (Orang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian (Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	**01**	**03**			**Program Pengembangan Kurikulum**	**Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar**	**-**	**100**	**96.000.000**	**100**	**97.314.240**	**100**	**99.750.015**	**100**	**102.143.018**	**100**	**104.580.151**	**100**	**104.580.151**		

		1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan	100	100	96.000.000	100	97.314.240	100	99.750.015	100	102.143.018	100	-	100	-		
		1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan LokalPendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	1	96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasaryang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	1	97.314.240	0	0	0	0	0	0	1	0		
		1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0	0	0	0	0	1390	99.750.015	0	0	0	0	1390	0		
		1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	0	80	0	80	0	80	0	80	102.143.018	80	-	80	-		
		1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	104.580.151	100	104.580.151		

		1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal yang Tersusun (Dokumen)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	104.580.151	0	104.580.151		
		1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia (Buku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum**	**-**	**100**	**281.322.500**	**100**	**285.173.805**	**100**	**292.311.705**	**100**	**299.324.263**	**100**	**306.466.140**	**100**	**306.466.140**		
		1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	100	100	281.322.500	100	285.173.805	100	292.311.705	100	299.324.263	100	306.466.140	100	306.466.140		

		1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100,000,000	1	100.000.000		
		1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Laporan)	0	1	181,322,500	1	185,173,805	1	192.311.705	1	199.324.263	1	206,466,140	1	206.466.140		
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	01	05	2,02		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatkan Indeks Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	01	05	2,02	01	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yangDiselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		1	01	05	2,02	02	1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	**01**	**06**			**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah**	-	**100**	**44.202.500**	**100**	**44.807.632**	**100**	**45.929.167**	**100**	**47.031.008**	**100**	**48.153.168**	**100**	**48.153.168**		
		1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	44.202.500	100	44.807.632	100	45.929.167	100	47.031.008	100	48.153.168	100	48.153.168		
		1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun (Kamus)	0	100	44,202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		

		1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)	0	0	0	1	44,807,632	0	0	0	0	0	0	1	0		
		1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota (Publikasi)	0	0	0	0	0	100	45.929.167	0	0	0	0	100	0		
		1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan KesastraanDaerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	10	47,031,008	0	0	10	0		
		1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	48,153,168	20	48.153.168		
		1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**463.845.500**		**470.195.545**		**481.964.540**		**493.526.869**		**505.302.419**		**505.302.419**		
Meningkatkan Prestasi Generasi Muda	Meningkatnya Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	-	4,20	200.000.000	8,83	202.738.000	5,00	207.812.532	30,01	212.797.955	82,00	217.875.314	82,00	217.875.314		
		2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor**	-	**100**	**116.239.015**	**100**	**113.638.001**	**100**	**114.019.682**	**100**	**114.466.898**	**100**	**110.776.912**	**100**	**110.776.912**		
		2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

		2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	-	75 Orang	116.239.015	75 Orang	113.638.001	75 Orang	114.019.682	75 Orang	114.466.898	75 Orang	110.776.912	75 Orang	110.776.912		
		2	19	02	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	-	**100**	**83.760.985**	**100**	**89.099.999**	**100**	**93.792.850**	**100**	**98.331.057**	**100**	**107.098.402**	**100**	**107.098.402**		
		2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	30 Orang	45.540.680	30 Orang	47.554.468	35 Orang	48.000.000	35 Orang	48.331.057	40 Orang	52.098.402	45 Orang	52.098.402		
		2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	30 Dokumen	38.220.305	35 Dokumen	41.545.531	40 Dokumen	45.792.850	50 Dokumen	50.000.000	50 Dokumen	55.000.000	50 Dokumen	55.000.000		

	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2	19	03			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Peningkatan Prestasi Olahraga	-	**0,39**	**165.200.000**	**0,77**	**167.461.588**	**1,53**	**171.653.152**	**3,03**	**175.771.111**	**6,00**	**179.965.009**	**6,00**	**179.965.009**		
		2	19	03	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga		100	165.200.000	100	167.461.588	100	171.653.152	100	175.771.111	100	179.965.009	100	179.965.009		
		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		10	165.200.000	10	167.461.588	10	171.653.152	10	175.771.111	10	179.965.009	10	179.965.009		

		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persaentase keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-		
		2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Eventdan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-		
		2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

		2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-		
		2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanStandardisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil PengembanganOrganisasi Keolahragaan (Organisasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

		2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama OrganisasiKeolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi OrganisasiKeolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang MenerimaPenghargaan (Organisasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-		
		2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival danOlahraga Rekreasi (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

		2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalamMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	-	4,06	98.645.500	4,26	99.995.957	4,51	102.498.856	4,75	104.957.803	5,00	107.462.096	5,00	107.462.096		
		2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	98.645.500	100	99.995.957	100	102.498.856	100	104.957.803	100	107.462.096	100	107.462.096		
		2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia danTermanfaatkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi KepramukaanTingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerahyang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

		2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM KepramukaanTingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yangMeningkat Kapasitasnya (Orang)	0	6	98,645,500	6	99,995,957	6	102,498,856	6	104,957,803	6	107.462.096	30	107.462.096		
		2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan PelatihanKepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan TingkatDaerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia danTermanfaatkan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

Tabel 6.3

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 -900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang/ Sub Bidang Penanggung-jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100**	**281.854.701.070**	**100**	**293.736.345.349**	**100**	**300.744.894.550**	**100**	**300.744.894.550**		
		1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**100**	**49.165.065.799**	**100**	**55.464.485.728**	**100**	**56.787.868.359**	**100**	**56.787.868.359**		
Mewujudkan Nilai	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**50,91**					**70,53**	**232.207.670.731**	**71,51**	**237.778.332.752**	**72,31**	**243.451.723.772**	**72,31**	**243.451.723.772**		
Reformasi Birokrasi Disdikpora								**Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**79,35**					**88**		**91**		**95**		**95**			
				1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen/laporan perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang diselesaiakn tepat waktu	80					100	406.000.000	100	413.000.000	100	421.000.000	100	421.000.000		
				1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2					2	66.000.000	2	73.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000		
				1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

				1	02.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
				1	02.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
				1	02.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
				1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	1					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat	100					100	208.422.130.731	100	212.690.792.752	100	218.563.183.772	100	218.563.183.772		
				1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1692					2245	207.977.130.731	2245	212.250.792.752	2245	218.085.183.772	2245	218.085.183.772		
				1	02.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Dokumen	2					4	21.000.000	4	24.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000		

							danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)														
				1	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD (Dokumen)	2					2	187.000.000	2	202.000.000	2	222.000.000	2	222.000.000		
				1	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1					1	25.000.000	1	28.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000		
				1	02.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2					2	60.000.000	2	28.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000		
				1	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12					12	30.000.000	12	33.000.000	12	37.000.000	12	37.000.000		
				1	02.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1					1	22.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	5	28.000.000		
				1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100					100	1.755.000.000	100	1.758.000.000	100	1.762.000.000	100	1.762.000.000		
				1	02.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai (Unit)	0					1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
				1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.05	0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	12					12	25.000.000	12	28.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000		

							AdministrasiKepegawaian	PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen)													
				1	02.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0					1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
				1	02.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0					1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
				1	02.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0					40	220.000.000	40	220.000.000	40	220.000.000	40	220.000.000		
				1	02.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0					1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
				1	02.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0					20	220.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000		
				1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0					100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
				1	02.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)	0					50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
				1	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0					50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
				1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admninitrasi umum kantor	100					100	2.287.000.000	100	2.447.000.000	100	2.608.000.000	100	2.608.000.000		
				1	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0					1	21.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000		

				1	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket)	12					12	73.000.000	12	81.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000		
				1	02.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan (Paket)	0					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
				1	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	0					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
				1	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanya ng Disediakan (Paket)	0					2	73.000.000	2	81.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000		
				1	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0					1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
				1	02.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
				1	02.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0					1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
				1	02.06	0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1					1	790.000.000	1	880.000.000	1	970.000.000	1	970.000.000		
				1	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen)	1					0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSist em Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1					1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
				1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100					100	5.900.000.000	100	5.980.000.000	100	5.550.000.000	100	5.550.000.000		

				1	02.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotoryang Disediakan (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	0		
				1	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit)	0					5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
				1	02.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
				1	02.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0					5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
				1	02.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	0					1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000		
				1	02.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					1	800.000.000	1	880.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000		
				1	02.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit)	0					1	500.000.000	1	500.000.000	1	-	1	0		
				1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan jasa	100					100	11.276.540.000	100	12.309.540.000	100	12.342.540.000	100	12.342.540.000		

							Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah														
				1	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100000000		
				1	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0					0	225.000.000	0	255.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000		
				1	02.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					1	25.000.000	1	28.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000		
				1	02.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					1	10.926.540.000	1	11.926.540.000	1	11.926.540.000	5	11.926.540.000		
				1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100					100	2.161.000.000	100	2.180.000.000	100	2.205.000.000	100	2.205.000.000		
				1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	78					78	125.000.000	78	140.000.000	78	160.000.000	390	160.000.000		
				1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Alat Besar yang	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

							BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dipelihara dandibayarkan Perizinannya (Unit)														
				1	02.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
				1	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	0				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
				1	02.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
				1	02.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
				1	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1				4	36.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
				1	02.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0				1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
				1	02.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0				1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang	1	1	2			**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%)	-				100	48.727.074.912	100	55.015.987.439	100	56.328.668.900	100	56.328.668.900		

Terjangkau	Pendidikan						Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)						100		100		100		100			
							Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)						100		100		100		100			
		1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100					100	23.469.048.633	100	28.541.390.955	100	28.755.880.936	100	28.755.880.936		
		1	1	2	02.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0					1	95.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		1	1	2	02.01	0003	pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Dibangun (Ruang)	0					0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	1	2	02.01	0004	pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0					1	100.000.000	1	110.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000		
		1	1	2	02.01	0005	pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0					0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	1	2	02.01	0006	pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun (Unit)	0					1	95.000.000	2	3.427.594.674	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1	1	2	02.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0					1	127.030.500	1	127.030.500	1	131.315.155	1	131.315.155		
		1	1	2	02.01	0009	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/KepalaSekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

		1	1	2	02.01	0010	rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit KesehatanSekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1	1	2	02.01	0011	rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		1	1	2	02.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		1	1	2	02.01	0014	pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	0					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
		1	1	2	02.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yangTersedia (Paket)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		1	1	2	02.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0					3	3.249.268.133	3	3.249.733.281	3	3.249.733.281	3	3.249.733.281		
		1	1	2	02.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, . Prasarana danUtilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000		
		1	1	2	02.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0					141	15.385.650.000	141	16.154.932.500	141	18.154.932.500	141	18.154.932.500		
		1	1	2	02.01	0022	pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000		
		1	1	2	02.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0					65	75.000.000	65	65.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000		
		1	1	2	02.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

							Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)															
		1	1	2	02.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0					0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	1	2	02.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yangDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0					1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000		
		1	1	2	02.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola DanaBOS (Satuan Pendidikan)	0					141	70.000.000	141	70.000.000	141	70.000.000	141	70.000.000		
		1	1	2	02.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang MeningkatKapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	0					141	70.000.000	141	70.000.000	141	70.000.000	141	70.000.000		
		1	1	2	02.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yangTelah Dibangun (Ruang)	0					0	-	0	-	0	0	0	0		
		1	1	2	02.01	0032	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					0	-	0	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1	1	2	02.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0					0	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000		
		1	1	2	02.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi						2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		

		1	1	2	02.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0					10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
		1	1	2	02.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
		1	1	2	02.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0					15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000		
		1	1	2	02.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
		1	1	2	02.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0					1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		1	1	2	02.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0					2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
		1	1	2	02.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
		1	1	2	02.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		1	1	2	02.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
		1	1	2	02.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0					20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		
		1	1	2	02.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

		1	1	2	02.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0					1	189.500.000	1	189.500.000	1	189.500.000	1	189.500.000		
		1	1	2	02.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5					5	300.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000		
		1	1	2	02.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakanJumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia						0	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
		1	1	2	02.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0					141	80.000.000	141	75.000.000	141	75.000.000	141	75.000.000		
		1	1	2	02.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0					6	955.000.000	6	1.225.000.000	6	1.555.000.000	6	1.555.000.000		
		1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100					100	17.680.618.395	100	18.682.217.539	100	19.567.053.683	100	19.567.053.683		
		1	1	2	02.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Dibangun (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDibangun (Ruang)	0					1	302875000	1	350300000	1	340300000	1	340300000		

		1	1	2	02.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDibangun (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0					1	105000000	1	120000000	1	110000000	1	110000000		
		1	1	2	02.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0					1	1105000000	1	652500000	1	600000000	1	600000000		
		1	1	2	02.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0					2	781250000	2	890000000	2	900000000	2	900000000		
		1	1	2	02.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun (Unit)	0					3	1325000000	3	773800000	3	803000000	3	803000000		
		1	1	2	02.02	0014	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					3	657250000	3	770000000	3	850000000	3	850000000		
		1	1	2	02.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit KesehatanSekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0017	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					1	225195000	1	266200000	1	292820000	1	292820000		
		1	1	2	02.02	0018	Rehabilitasi Sedang /Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Ruang)	0					2	440660500	2	532400000	2	600700000	2	600700000		
		1	1	2	02.02	0019	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang SerbaGuna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDirehabilitasi sedang/berat (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.02	0021	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas KepalaSekolah/ Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0					1	325400000	1	484390000	1	392000000	1	392000000		
		1	1	2	02.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0023	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang DirehabilitasiSedang/Berat (Unit)	0					2	350748000	2	415937500	2	300000000	2	300000000		
		1	1	2	02.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0					2	170946749	2	300000000	2	500000000	2	500000000		
		1	1	2	02.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0					1	99000000	1	108900000	1	300000000	1	300000000		
		1	1	2	02.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yangTersedia (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0					52	8824054200	52	9711130000	52	9447173356	52	9447173356		

		1	1	2	02.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yangTersedia (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yangTersedia (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0					100	74270000	50	90750000	500	95825000	500	95825000		
		1	1	2	02.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yangDilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah MenengahPertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yangMengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0					1	31000000	1	39930000	1	39932000	1	39932000		
		1	1	2	02.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0					1	32000000	52	39930000	52	30930000	52	30930000		
		1	1	2	02.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.02	0045	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0					0	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		

		1	1	2	02.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0					52	105.968.200	52	116.250.039	52	127.866.300	52	127.866.300		
		1	1	2	02.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0					100	140.000.746	6.234	165.000.000	6.234	181.500.000	6.234	181.500.000		
		1	1	2	02.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0					1	1.105.000.000	1	601.000.000	1	948.000.000	1	948.000.000		
		1	1	2	02.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0					52	1.480.000.000	52	1.753.800.000	52	1.820.000.000	52	1.820.000.000		
		1	1	2	02.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	0					0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1	1	2	02.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0					0	-	-	-	2	387.007.027	2	387.007.027		
		1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	100					100	4.813.771.425	100	4.971.868.568	100	5.145.775.425	100	5.145.775.425		
		1	1	2	02.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Telah Dibangun (Unit)	0					3	478.270.650	3	526.097.715	3	578.707.487	3	578.707.487		
		1	1	2	02.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	0					2233	40.528.950	2233	44.581.845	2233	49.040.030	2233	49.040.030		
		1	1	2	02.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang MenerimaBiaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0					3579	39.600.000	3579	43.560.000	3579	47.916.000	3579	47.916.000		

		1	1	2	02.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yangTersedia (Paket)	0					3	83.600.000	3	91.960.000	3	101.156.000	3	101.156.000		
		1	1	2	02.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang MengikutiProses Belajar (Peserta Didik)	0					1	64.000.000	1	70.400.000	1	77.440.000	1	77.440.000		
		1	1	2	02.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada PAUD (Orang)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang DilaksanakanPembinaanKelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0					167	252.912.035	167	278.203.239	167	306.023.562	167	306.023.562		
		1	1	2	02.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0					167	3.232.800.000	167	3.232.800.000	167	3.232.800.000	167	3.232.800.000		
		1	1	2	02.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0					0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara						0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi						-	-	-	-	-	-	-	-		

		1	1	2	02.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun						1	116.967.070	1	128.663.777	1	141.530.155	1	141.530.155		
		1	1	2	02.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik						-	-	-	-	-	-	-	-		

		1	1	2	02.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						11	30.250.000	11	33.275.000	11	36.602.500	11	36.602.500		
		1	1	2	02.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						0	-	0	-	0	-	0	-		
		1	1	2	02.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia						500	474.842.720	500	522.326.992	500	574.559.691	500	574.559.691		
		1	1	2	02.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan						-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100					100	2.763.636.459	100	2.820.510.377	100	2.859.958.856	100	2.859.958.856		
		1	1	2	02.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	0					0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000		
		1	1	2	02.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0					1	121000000	1	133100000	1	146410000	1	146410000		
		1	1	2	02.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danManajemen (Satuan Pendidikan)	0					4	249.466.459	4	278873377	4	288108156	4	288108156		
		1	1	2	02.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan (Orang)	0					0	2.039.500.000	0	2.039.500.000	0	2.039.500.000	0	2.039.500.000		
		1	1	2	02.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		1	1	2	02.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0					0	153.670.000	0	169.037.000	0	185.940.700	0	185.940.700		
		1	1	2	02.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	2	02.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

			1	3			**Program Pengembangan Kurikulum**	**Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar**	**-**					**100**	**99.750.015**	**100**	**102.143.018**	**100**	**104.580.151**	**100**	**104.580.151**		
		1	1	3	02.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan	100					100	99.750.015	100	102.143.018	100	0	100	0		
		1	1	3	02.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal PendidikanDasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasaryang Tersusun (Dokumen)	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	1	3	02.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0					1.390	99.750.015	-	-	-	-	-	-		
		1	1	3	02.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang MeningkatKompetensinya (Orang)	0					80	-	80	102.143.018	80	-	80	-		
		1	1	3	02.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah						0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun						0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun						-	0	0	0	0	0	0	-		
		1	1	3	02.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100					100	0	100	0	100	104.580.151	100	104.580.151		

		1	1	3	02.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia (Buku)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	3	02.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0					1	0	1	0	1	104.580.151	1	104.580.151		
		1	**1**	**4**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum**	**-**					**100**	**292.311.705**	**100**	**299.324.263**	**100**	**306.466.140**	**100**	**306.466.140**		
		1	1	4	02.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100					100	292.311.705	100	299.324.263	100	306.466.140	100	306.466.140		

							Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	yang memenuhi kualifikasi S1/DIV															
		1	1	4	02.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)	0					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
		1	1	4	02.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Laporan)	0					1	192.311.705	1	199.324.263	1	206.466.140	1	206.466.140		
		1	**1**	**6**			**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah**	-					**100**	**45.929.167**	**100**	**47.031.008**	**100**	**48.153.168**	**100**	**48.153.168**		
		1	1	6	02.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100					100	45.929.167	100	47.031.008	100	48.153.168	100	48.153.168		
		1	1	6	02.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun (Kamus)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	6	02.01	0002	Vitalitas,	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

							Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa)															
		1	1	6	02.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Publikasi)	0					100	45929167	0	0	0	0	0	0		
		1	1	6	02.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan KesastraanDaerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	0					0	0	10	47.031.008	0	0	0	0		
		1	1	6	02.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)	0					0	0	10	0	10	48.153.168	10	48.153.168		
		1	1	6	02.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	6	02.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**481.964.540**		**493.526.869**		**505.302.419**		**505.302.419**		
Meningkatkan Prestasi Generasi Muda	Meningkatnya Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	**2**	**19**	**2**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	-					5	207.812.532	30,01	212.797.955	82	217.875.314	82	217.875.314		

		2	19	2	02.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor**	**-**					**100**	**114.019.682**	**100**	**114.466.898**	**100**	**110.776.912**	**100**	**110.776.912**		
		2	19	2	02.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-					10	114.019.682	10	114.466.898	10	110.776.912	10	110.776.912		
		2	19	2	02.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	2	02.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-					0	0	0	0	0	0	0	0		

		2	19	2	02.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya MelaluiPerlindungan Pemuda, Advokasi, AksesPengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemudadalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan ProgramStrategis Kepemudaan	-					Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	19	2	02.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-					Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		
		2	19	2	02.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-					Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		

		2	1 9	2	02.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-					Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	1 9	2	02.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	-					Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-		
		2	1 9	2	02.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	-					**100**	**93.792.850**	**100**	**98.331.057**	**100**	**107.098.402**	**100**	**107.098.402**		
		2	1 9	2	02.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-					35 Orang	48.000.000	35 Orang	48.331.057	40 Orang	52.098.402	45 Orang	52.098.402		
		2	1 9	2	02.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-					40 Dokumen	45.792.850	50 Dokumen	50.000.000	50 Dokumen	55.000.000	50 Dokumen	55.000.000		
		2	1 9	3			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Peningkatan Prestasi Olahraga(Medali)	-					**1,53**	**171.653.152**	**3,03**	**175.771.111**	**6**	**179.965.009**	**6**	**179.965.009**		
		2	1 9	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persaentase Peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	100					100	171.653.152	100	175.771.111	100	179.965.009	100	179.965.009		

		2	19	3	02.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0					10	**171.653.152**	10	**175.771.111**	10	**179.965.009**	10	**179.965.009**		
		2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persaentase keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	100					100	0	100	0	100	0	100	0		
		2	19	3	02.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Eventdan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan KejuaraanMulti Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.03		Pembinaan	Persentase Pembinaan dan	100					100	0	100	0	100	0	100	0		

						dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah															
		2	19	3	02.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100					100	0	100	0	100	0	100	0		
		2	19	3	02.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanStandardisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.04	0003	Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

						Kerja Sama OrganisasiKeolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)															
		2	19	3	02.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi OrganisasiKeolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang MenerimaPenghargaan (Organisasi)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100					100	0	100	0	100	0	100	0		
		2	19	3	02.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival danOlahraga Rekreasi (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	3	02.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalamMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanOlahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		2	19	4			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	-					4,51	102.498.856	4,75	104.957.803	5	107.462.096	5	107.462.096		
		2	19	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100					100	102.498.856	100	104.957.803	100	107.462.096	100	107.462.096		
		2	19	4	02.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia danTermanfaatkan (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	4	02.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi KepramukaanTingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerahyang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	4	02.01	0003	Pengembanga Kapasitas SDM KepramukaanTingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yangMeningkat Kapasitasnya (Orang)	0					6	102.498.856	6	104.957.803	6	107.462.096	6	107.462.096		
		2	19	4	02.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan PelatihanKepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	4	02.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan TingkatDaerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan TingkatDaerah (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	4	02.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia danTermanfaatkan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	19	4	02.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0		

		2	19	4	02.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian/keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*10*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*6*
1	Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	95,14	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	93,96	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	98,42	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	98,42	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS SD/MI, SMP/MTs)	98,42	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	93,96	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	n/a	4,2	8,83	18,55	39,01	82	82
8	Peningkatan Prestasi Olahraga	n/a	40	50	60	70	80	80
9	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	n/a	4,06	4,26	4,51	4,75	5,00	5,00

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	95,14	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	93,96	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	98,42	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.4
Indikator SDGS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022- 2026

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.4	Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya,setera, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relavan dan efektif							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	%	99	99	99	99	99	99
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/sederajat	%	98	92,12	93,72	95,34	97,00	98,68
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja; (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai kemampuan minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	63,83	69,5	81,56	85,11	88,65	92,2
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	65,38	65,38	73,08	76,92	80,77	84,62
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	107,82	106,21	104,62	103,06	101,52	100

4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	%	89,50	91,51	93,56	95,66	97,81	100
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun	Angka	63,83	69,5	81,56	85,11	88,65	92,2
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan dasar							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	68	70	72	74	76	78
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat,masyarakat penduduk asli,dan anak-anak dalam kondisi rentan							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/Mi/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi							
	(1) SD/MI/Sederajat	%	99,29	99,46	99,54	99,63	99,71	99,8
	(2) SMP/MTs/Sederajat	%	79,83	85,77	88,90	82,15	99,51	99
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun Perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 Tahun	%	93,95	95,60	96,44	97,29	98,14	99
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24 Tahun dan umur 15-59 Tahun	%	99,67	99,78	99,83	99,89	99,94	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategik dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun.

Perubahan Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayarmenjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Benteng,1 Agustus 2023

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs.MESDIYONO, M.EC.DEV
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626 199311 1 002